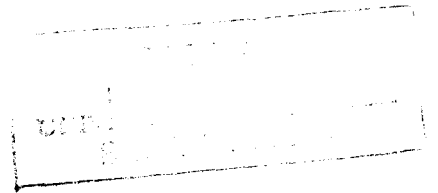




LAPORAN PENELITIAN  
DIP UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

KKB  
KK-2B  
322.44  
Sup  
P-2

**POLA UNJUK RASA DI DAERAH PERKOTAAN  
(Studi Tentang Unjuk Rasa Buruh, Sopir, Mahasiswa dan  
Warga Kampung di Surabaya)**



Peneliti :

**Drs. GITADI TEGAS SUPRAMUDYO, M.Si.**

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh : DIP Universitas Airlangga 1999/2000  
Nomor SK. Rektor 8402/J03/PP/1999  
Nomor Urut : 104

*3000 21100 3141*

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Februari, 2000



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
LEMBAGA PENELITIAN

- |                                      |                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Puslit Pembangunan Regional       | 5. Puslit Pengembangan Gizi(5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional           | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)     | 10. Puslit / Kesehatan Reproduksi                |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum         | 7. Puslit Olahraga                   |                                                  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi                  |                                                  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 — Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995246  
E-mail: lpunair@rad.net.id — http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Pola Unjuk Rasa Di Daerah Perkotaan  
(Studi tentang unjuk rasa buruh, sopir, mahasiswa dan warga kampung di Surabaya)
- b. Macam Penelitian : ( ) Fundamental, ( V ) Terapan, ( ) Pengembangan,  
( ) Instiusional
- c. Katagori Penelitian : ( ) I ( V ) II ( ) III
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Gitadi Tegas Supramudyo, M.Si.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Pangkat/Golongan dan NIP: Pena ta Muda Tk.I / IIIb / 131 569 363
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Puslit Pengembangan Hukum
- f. Univ./Inst. /Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Ilmu Politik
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 (Satu) orang
4. Lokasi Penelitian : Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : Rp 3.750.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 23 Februari 2000
- b. Hasil Penelitian : ( ) Baik Sekali ( V ) Baik  
( ) S e d a n g ( ) K u r a n g

Surabaya, 23 Februari 2000

Mengetahui/Mengesahkan :  
Dian Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian,  
Prof. Dr. Noor Cholies Zaini †  
130 355 372

## RINGKASAN

(POLA UNJUK RASA DI DAERAH PERKOTAAN (STUDI TENTANG UNJUK RASA BURUH, SOPIR, MAHASISWA DAN WARGA KAMPUNG DI SURABAYA)) (Gitadi Tegas Supramudyo, 2000, 62 halaman)

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan tentang: (1) Bagaimana pola unjuk rasa mahasiswa, buruh/karyawan, sopir dan warga kampung yang terjadi di Surabaya, dan; (2) Bagaimana tujuan jangka panjang dari perkembangan unjuk rasa mahasiswa, buruh, sopir dan warga kampung di masa masa yang akan datang.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran jelas tentang pola unjuk rasa di daerah perkotaan dan misi dari unjuk rasa di masa datang. Dalam upaya mengupas pola unjuk rasa yang terjadi di daerah perkotaan ini, penelitian dibatasi pada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh/karyawan, sopir dan warga kampung di Surabaya.

Data penelitian yang diambil dari waktu antara tahun 1995 sampai September 1999, diperoleh dari berbagai surat kabar yang terbit di Surabaya, dengan asumsi surat kabar surat kabar tersebut banyak memuat atau mengangkat berita lokal. Selain itu, dilakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait, yaitu: LBH, SPSI dan Organda agar data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Teknik analisa yang digunakan, sesuai dengan permasalahan yang diangkat, menggunakan analisa data kualitatif.

Dari hasil temuan data dan analisa, akhirnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Isu yang sering diangkat oleh pelaku unjuk rasa adalah sesuai dengan karakteristik/ciri yang melingkupi dan berangkat dari kepentingan dasar para pelaku unjuk rasa itu sendiri. Mahasiswa dengan tuntutan/isu tentang *reformasi* total, Buruh/karyawan dengan tuntutan mengenai *kenaikan upah* kerja, sopir yang mempermasalahkan *pemberian ijin trayek baru* dan warga kampung dengan

persoalan *tanah*. Dalam hal *tempat/ lokasi* sasaran unjuk rasa, mahasiswa dan buruh/karyawan lebih sering melakukan unjuk rasa di *tempat mereka banyak melakukan aktifitas*. Sopir lebih mengutamakan *dinas* atau instansi pemerintah yang banyak berpengaruh/menentukan bagi lancar atau tidaknya jalur/lahan garap pekerjaan mereka. Sementara warga kampung lebih mempercayakan persoalannya untuk di bawa ke *DPRD*. Tentang cara unjuk rasa, *semua pelaku* unjuk rasa (mahasiswa, buruh/karyawan, sopir dan warga kampung lebih) memilih cara melakukan orasi dan menggelar sepanduk dengan mendatangi tempat-tempat tertentu. Namun mahasiswa, buruh/karyawan dan warga kampung lebih suka mendatangi kantor wakil rakyat, dan hal ini berbeda dengan sopir yang lebih suka mendatangi kantor pemda maupun departemen pemerintah. Sedangkan mengenai *jumlah* massa yang dikerahkan, mahasiswa dan buruh/karyawan yang notabene telah memiliki organisasi/asosiasi yang telah mapan, lebih mampu mengerahkan massa dalam jumlah besar untuk mengartikulasikan tuntutan mereka dibandingkan dengan sopir dan warga kampung. Aksi unjuk rasa selalu membuka peluang terhadap munculnya korban dan kerugian, semakin sering unjuk rasa dilakukan, maka peluang timbulnya korban jiwa dan kerugian harta benda juga semakin besar. Selama ini korban jiwa terbesar ada pada mahasiswa yang memang paling banyak melakukan aksi unjuk rasa dibanding pelaku lainnya. Melihat arah perkembangan unjuk rasa mahasiswa, buruh/karyawan, sopir dan warga kampung akhir akhir ini, tampaknya lebih mengarah pada keinginan keinginan yang bermuara pada terwujudnya *clean government* melalui tindakan kontrol mereka pada lingkungan sekitar melalui unjuk rasa.

Secara teoritik unjuk rasa sebagai salah satu bentuk partisipasi politik dan *social control* memang mengarah pada terwujudnya perubahan sosial, ekonomi serta politik yang lebih demokratis.

(Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Universitas Airlangga:  
No. Kontrak 805/J032/PG/1999, 1 Oktober 1999)

## KATA PENGANTAR

Syukur ke hadirat Allah Swt. Sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu. Penelitian ini mengambil tema sentral yang saat ini masih cukup kuat gaungnya dalam masyarakat kota besar seperti Surabaya, -bahkan ada kecenderungan meluas ke kota-kota di pinggiran dan luar kota Surabaya, sampai ke pelosok-pelosok desa,- yaitu persoalan unjuk rasa. Khusus di kota Surabaya, tempat penelitian unjuk rasa mahasiswa, buruh/karyawan, sopir dan warga masyarakat ini dilakukan, didapat beberapa kesimpulan menarik yang kemungkinan dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sama, pada kelompok masyarakat yang sama di kota-kota lain. Terdapat beberapa pola yang berbeda diantara kelompok kelompok masyarakat dalam penelitian ini, terkait dengan: Isu yang dipilih, tempat/lokasi unjuk rasa, cara yang dipilih untuk berunjuk rasa, dan jumlah massa yang dikerahkan untuk berunjuk rasa serta kerugian harta benda dan korban fisik yang ditimbulkan. Selanjutnya, sebagai bagian dari sebuah aktivitas intelektual, penelitian ini juga mencoba membuat prediksi ilmiah berdasarkan teori dan kecenderungan yang dideteksi dari hasil penelitian di 4 kelompok masyarakat sebagaimana dikemukakan diatas. Untuk itu telah dilakukan wawancara mendalam kepada 3 instansi yang diasumsikan paling berkompeten, yaitu: LBH, SPSI dan Organda. Dari hasil wawancara mendalam tersebut diperoleh kesimpulan sementara, bahwa dimasa mendatang unjuk rasa sebagai satu bentuk penyampaian tuntutan terhadap perubahan sosial ekonomi dan politik, akan lebih mendapat tempat dalam wacana

berdemokrasi di Indonesia. Dari perspektif teori, hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya unjuk rasa atau demonstrasi adalah satu bentuk klasik dari partisipasi politik yang mengartikulasikan tuntutan ketidakpuasan dan perubahan sosial ekonomi dan politik.

Pada akhirnya perkenankan peneliti menyampaikan dua hal, yaitu :

1. Terima kasih yang sebesar besarnya pada semua pihak yang membantu terselenggaranya penelitian ini, yaitu : Ketua Lembaga Penelitian Unair, Bapak/ibu dari LBH, SPSI dan Organda, terima kasih berat khususnya kepada mbak Ninuk dkk.
2. Permohonan maaf pada siapapun yang menemukan kelemahan dan kekurangan baik secara prosedural maupun substansial, dari Penelitian ini.

Terakhir, perlu kami sampaikan juga bahwa sebagaimana aktifitas intelektual pada umumnya, penelitian ini sangat terbuka pada kritik dan saran apapun yang bertujuan untuk perkembangan teori di bidang ilmu politik. Untuk itu masukan masukan konstruktif sangat kami harapkan.

Wassalam.

Peneliti

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.1. Permasalahan .....	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	6
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	15
III.1. Tujuan Penelitian .....	15
III.2. Manfaat Penelitian.....	15
BAB IV : METODE PENELITIAN.....	17
IV.1. Definisi Operasional .....	17
IV.2. Lokasi Penelitian.....	18
IV.3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
IV.4. Teknik Analisis Data.....	18
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
V.1. Pola Penyampaian Aspirasi Pelaku Unjuk Rasa.....	20
V.1.1. Tuntutan-tuntutan/Isu-isu.....	20
V.1.2. Tempat Sasaran.....	30
V.1.3. Cara-cara yang Ditempuh.....	37
V.1.4. Jumlah Massa.....	44
V.1.5. Kerugian Harta Benda dan Korban Fisik.....	49
V.2. Tujuan Jangka Panjang dari Perkembangan Pelaku Unjuk Rasa Di Masa Datang .....	53
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	63

## DAFTAR TABEL

TABEL I	Unjuk Rasa Mahasiswa, Buruh/Karyawan, Sopir dan Warga Kampung di Surabaya (1995 s/d. September 1999).....	3
TABEL II	Tuntutan/Isu Unjuk Rasa Mahasiswa di Surabaya (1995 s/d. September 1999).....	22
TABEL III	Orientasi Isu Unjuk Rasa Mahasiswa di Surabaya (1995 s/d. September 1999).....	24
TABEL IV	Tuntutan/Isu Unjuk Rasa Buruh/Karyawan di Surabaya (1995 S/d. September 1999).....	26
TABEL V	Tuntutan/Isu Unjuk Rasa Sopir di Surabaya (Tahun 1995 s/d. September 1999).....	27
TABEL VI	Tuntutan/Isu Unjuk Rasa Warga Kampung di Surabaya (Tahun 1995 s/d. September 1999).....	29
TABEL VII	Tempat Sasaran Unjuk Rasa Mahasiswa di Surabaya (1995 s/d. September 1999).....	32
TABEL VIII	Tempat Sasaran Unjuk Rasa Buruh/Karyawan di Surabaya (1995 s/d. September 1999).....	34
TABEL IX	Tempat Sasaran Unjuk Rasa Sopir di Surabaya (1995 s/d. September 1999).....	35
TABEL X	Tempat Sasaran Unjuk Rasa Warga Kampung di Surabaya (1995 s/d. September 1999).....	36
TABEL XI	Cara-cara yang Ditempuh pada Unjuk Rasa Mahasiswa di Surabaya (1995 s/d. September 1999).....	39
TABEL XII	Cara-cara yang Ditempuh pada Unjuk Rasa Buruh/Karyawan (1995 s/d. September 1999).....	41
TABEL XIII	Cara-cara yang Ditempuh pada Unjuk Rasa Sopir di Surabaya (1995 s/d. September 1999).....	42
TABEL XIV	Cara-cara yang Ditempuh pada Unjuk Rasa Warga Kampung di Surabaya (1995 s/d. September 1999).....	43
TABEL XV	Jumlah Massa yang Dikerahkan pada Unjuk Rasa Mahasiswa di Surabaya (1995 s/d. September 1999).....	44
TABEL XVI	Jumlah Massa yang Dikerahkan pada Unjuk Rasa Buruh/Karyawan di Surabaya (1995 s/d. September 1999).....	46
TABEL XVII	Jumlah Massa yang Dikerahkan pada Unjuk Rasa Sopir di Surabaya (1995 s/d. September 1999).....	47
TABEL XVIII	Jumlah Massa yang Dikerahkan pada Unjuk Rasa Warga Kampung di Surabaya (1995 s/d. September 1999).....	48



**BAB I****PENDAHULUAN****I.1. Latar Belakang Masalah**

Tak dapat dipungkiri, bahwa gejala unjuk rasa selalu melekat dalam struktur masyarakat manapun dan selalu bergolak dalam waktu dan keadaan kapanpun. Adalah suatu realita, unjuk rasa telah ada semenjak jaman nenek moyang. Dalam rentang waktu yang cukup panjang unjuk rasa melengkapi sejarah bangsa Indonesia, yang diawali semenjak masa raja-raja terdahulu, jaman kolonial Belanda, dilanjutkan pada masa orde lama, orde baru hingga menembus pada jaman reformasi sekarang ini.

Sebenarnya, aksi unjuk rasa sering ditimbulkan oleh masyarakat atau kelompok yang berposisi marginal, miskin, tersisih, tersubordinasi dan yang selalu merasa dirugikan oleh keadaan yang tengah berlangsung, dan biasanya memiliki ambisi dan obsesi untuk melakukan perubahan, salah satunya adalah dengan melahirkan berbagai tuntutan.

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bentuk luapan protes akibat dari masalah sosial, ekonomi dan politik yang tengah berlangsung, dan tempat yang dianggap paling kondusif terhadap lahirnya masalah-masalah tersebut adalah daerah perkotaan. Kesenjangan sosial-ekonomi-politik jauh lebih menonjol di daerah perkotaan dari pada di pedesaan, karena kota sebagai pusat dari segala aktifitas,

mulai dari ekonomi, perdagangan, industri, keuangan, jasa, politik dan pemerintahan, pendidikan, rekreasi sampai pada pusat informasi serta budaya. Penghuni kota tentu mempunyai mobilitas yang tinggi, penuh dinamika dan pada akhirnya lebih responsif terhadap segala permasalahan yang timbul serta dirasakan mengganggu.

Perkembangan yang dialami suatu kota selain membawa dampak yang positif, sekaligus juga berdampak negatif. Perkembangan suatu kota di satu sisi dapat mempermudah kehidupan warganya, tetapi di sisi lain menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru. Tingginya tingkat kompetisi diantara warga kota untuk mempertahankan hidup, sementara arus urbanisasi yang relatif tinggi menjadikan beban berat yang harus dipikul kota, kota semakin sulit memenuhi semua kebutuhan warganya. Bukti masih banyaknya kasus unjuk rasa ataupun bentuk protes-protes lain yang dilakukan oleh para mahasiswa, buruh/karyawan, sopir dan warga kampung tertuang secara jelas pada tabel berikut ini.

**Tabel. I.**  
**Unjuk Rasa Mahasiswa, Buruh/Karyawan, Sopir dan Warga Kampung**  
**di Surabaya**  
**(1995 s/d. September 1999)**

No.	Jenis	Tahun					Jumlah
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Mahasiswa	19	13	16	170	96	314
2	Buruh/karyawan	22	13	15	18	61	129
3	Sopir	8	6	5	3	4	26
4	Warga Kampung	10	12	4	35	30	91
	<b>Jumlah</b>	59	44	40	226	191	560

Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Jawa Pos, Surya, SI, Memorandum.

Unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh, dinilai oleh banyak pengamat sebagai fenomena yang dipicu oleh kondisi kerja yang sangat buruk, tidak berlakunya jamsostek dengan semestinya serta upah yang sangat rendah. Meningkatnya persaingan/kompetisi untuk berlomba mendapatkan rezeki, upaya agar terus survive \_\_dilahan yang terbatas\_\_ menyebabkan para buruh merasa perlu untuk menuntut hak-haknya dalam wujud aksi unjuk rasa. Bahkan tak jarang, aksi ini tidak hanya dilakukan dengan menggelar 'demo' semata, melainkan boikot/mogok kerja, blokade pabrik, bahkan dengan melakukan penyanderaan seseorang atau sekelompok orang yang dinilai mampu untuk merubah keadaan ke arah yang lebih baik.

Sementara itu dalam bidang transportasi, di satu pihak kepadatan penduduk kota secara otomatis perlu diimbangi dengan kebutuhan mobilitas yang tinggi dan menuntut tersedianya jumlah angkutan yang cukup memadai, di pihak lain tidak dibarengi dengan upaya penanganan secara serius dari pihak aparat, sehingga banyak ditemukan peraturan-peraturan ataupun langkah-langkah aparat pemerintah yang sering mengundang para sopir untuk melakukan aksi unjuk rasa. Misalnya tentang persoalan pemberian ijin trayek baru, perubahan jalur/jalur yang berhimpitan dan lain-lain. Tidak berbeda dengan unjuk rasa buruh, para sopir terkadang menggunakan cara kekerasan ketika memperjuangkan tuntutannya, misalnya dengan memecah kaca jendela kantor.

Pun unjuk rasa mahasiswa yang terjadi, ditengarai merupakan cerminan dari situasi sosial-ekonomi-politik yang membelenggu, ketidakadilan sosial, kebijakan luar negeri pemerintah yang dinilai tidak adil, ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil penguasa dan pemerintah, politik yang dirasa telah menjadi kurang bahkan tidak demokratis, merupakan sejumlah akar persoalan yang kerap kali menjadi faktor pemicu timbulnya aksi unjuk rasa. Munculnya unjuk rasa didorong oleh keinginan untuk mengubah kondisi kehidupan yang lebih memenuhi harapan, dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, mahasiswa akan cenderung bertindak sebagai 'hati nurani' rakyat, namun dalam aksinya diwarnai pula aksi dengan maksud melecehkan pejabat-pejabat negara, contoh yang ekstrim yaitu dengan mendaftarkan pejabat-pejabat negara tertentu ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan, memberikan penghargaan/hadiah yang mengandung makna menghina dan lain sebagainya.

Demikian pula unjuk rasa warga kampung, dipicu oleh faktor-faktor yang tak lepas dari suasana ketidakadilan, ketimpangan pendistribusian sumber-sumber ke semua lapisan masyarakat, sehingga memaksa mereka membentuk solidaritas lokal. Misalnya persoalan konflik tanah. Anuk massa merupakan cerminan dari upaya penyampaian aspirasi mereka, yaitu dengan menduduki daerah/lokasi yang dianggap sebagai haknya, melakukan penghancuran bahkan pembakaran sarana-sarana umum.

Kota sebagai pusat aktifitas tidak hanya merupakan sumber masalah, namun mengingat fungsinya, kota juga dianggap sebagai tempat yang tepat untuk meluapkan segala tuntutan. Sehingga tak diragukan lagi, dalam segi frekuensi aksi unjuk rasa lebih banyak terjadi di perkotaan.

Tak terkecuali hingga di akhir masa orde baru, pada era reformasi seperti saat ini yang notabene saluran aspiratif warga lebih dimungkinkan untuk disalurkan, para mahasiswa, buruh/karyawan, sopir dan warga kampung tak segan-segan lagi melakukan unjuk rasa, pola yang ditampilkan mereka pun menjadi perlu disimak, baik dilihat dari tuntutan/isu yang diperjuangkan, sasaran tempat ketika melakukan unjuk rasa, cara-cara yang ditempuh, jumlah massa yang dikerahkan dan macam kerugian serta korban fisik yang ditimbulkan, yang secara tidak langsung sekaligus dapat pula memberi gambaran tentang tujuan jangka panjang dari perkembangan unjuk rasa itu sendiri pada masa mendatang.

## **I. 2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana pola dari unjuk rasa mahasiswa, buruh/karyawan, sopir dan warga kampung yang terjadi di daerah Surabaya?
2. Bagaimana tujuan jangka panjang dari perkembangan unjuk rasa mahasiswa, buruh/karyawan, sopir dan warga kampung di masa datang?

## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

Teori gerakan sosial atau unjuk rasa yang dikembangkan oleh Ted Robert Gurr dikenal dengan '*Relative Deprivation*' (deprivasi relatif). Dalam teorinya Gurr mengatakan, bahwa tingkah laku agresif, khususnya tingkah laku agresif massa timbul sebagai akibat adanya frustrasi di masyarakat. Frustrasi ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian negatif antara harapan yang wajar dengan kenyataan yang didapatkan.

Senada dengan Gurr, James Davis juga mengatakan bahwa deprivasi relatif terjadi karena terdapatnya kesenjangan rasio antara *expected need satisfaction* dan *actual need satisfaction*, dan suatu gerakan sosial atau revolusi biasanya terjadi terlahir karena dua kondisi, yaitu: Pertama, adanya harapan dari kepuasan kebutuhan yang selalu bertambah, dan kedua, tiba-tiba secara dramatik runtuh sehingga terjadi suatu kepuasan kebutuhan senyatanya. *Gap* yang terjadi dari meluasnya ke-dua faktor tersebut menghasilkan frustrasi umum (yang merata) yang pada akhirnya menghasilkan secara langsung agresi melawan pemerintah (Mark N. Hagopian, 1978: 290-291).

Neil Smelser dalam bukunya '*Theory of Collective Behaviour*' berpendapat bahwa suatu gerakan sosial atau unjuk rasa dapat terjadi jika terdapat *Necessary Conditions* atau sejumlah faktor pendorong. Terdapat enam faktor pendorong atau

penentu menurut Smelser yang harus saling mendukung dan terkait satu dengan lainnya, yakni terdiri atas: Pertama, *Structural Conduciveness*, yaitu terdapatnya suatu struktur sosial yang mendukung terhadap lahirnya suatu gejala; kedua, *Structural Strain*, yaitu terdapatnya suatu ketegangan struktural yang timbul, misalnya dengan adanya suatu ancaman tertentu; ketiga, *The Spread of Generalized Belief*, yaitu tersebarnya keyakinan umum yang dianut. Situasi dibuat bermakna bagi para pelaku potensial, sumber-sumber ketegangan dan cara menghadapinya harus diidentifikasi; keempat, *The Precipitating Factor*, yaitu faktor pencetus dan berupa sesuatu yang dramatik; kelima, *Mobilization into Action*, yaitu suatu mobilisasi untuk bertindak; keenam, *The Operation of Social Control*, yaitu pengoperasian kontrol sosial atau faktor penentu yang berbalik mencegah, mengganggu, memblokkkan, merintanggi gejala-gejala itu, dengan cara: (a) mencegah terjadinya episode gejala-gejala sosial, dan (b) mobilitas alat-alat negara segera setelah gejala sosial terjadi. Jika salah satu faktor saja yang tampil kepermukaan, tidak akan dapat menimbulkan gejala, melainkan harus merupakan kombinasi keenam faktor tersebut yang mampu untuk melahirkan gejala.

Mark N. Hagopian kemudian berpendapat, bahwa periode empat tahap pertama dari tahapan gerakan sosial Smelser, dinamakan masa inkubasi. Sedangkan tahap kelima adalah faktor aksi (periode aksi), dan tahap keenam merupakan periode adaptasi atau yang dikenal institusionalisasi.

Unjuk rasa sebagai tindakan yang bersifat kolektif, tentu mensyaratkan adanya individu-individu sebagai anggotanya. Terdapat beberapa kelompok manusia yang sangat potensial dan mudah diajak untuk melakukan aksi unjuk rasa, menurut Hoffer, diantaranya adalah: orang miskin (terutama orang miskin baru), orang yang sedang mengalami frustrasi, orang yang tidak puas, orang yang tersingkir, kelompok usia muda, juga kelompok marginal di tengah masyarakat (Hoffer, 1993:26).

Berbicara tentang unjuk rasa mahasiswa, tentu bukan timbul dari sesuatu yang vakum, melainkan ada konteks permasalahan mengapa mahasiswa secara bersama-sama berani menyatakan sikap. Gerakan mahasiswa bisa juga muncul karena terdapat 'kegusaran'. Kegusaran mahasiswa karena melihat realitas yang begitu ambigu. Dr. Umar Kayam, dalam seminar bersama di kampus UGM tentang Idealisme, Sosok dan Intelektualitas Mahasiswa Tahun 1980-an pada tahun 1989, pernah mengatakan bahwa gerakan mahasiswa merupakan tonggak awal dari keadaan kritis, juga pengamatan terus-menerus terhadap masalah-masalah di masyarakat serta ketepatan mereka menempatkan fungsi dalam usaha mengatasi masalah tersebut. Sementara, Husni Thamrin menanggapi bahwa masalah ini disebabkan oleh berbagai kepincangan sosial di masyarakat, juga bisa pula karena pandangan mahasiswa terhadap masa depannya sendiri yang suram.

Dimanapun, hakekat dari gerakan politik mahasiswa adalah untuk menumbuhkan perubahan sosial dan mendorong perubahan politik. Gerakan



mahasiswa tumbuh karena dorongan untuk merubah kondisi kehidupan yang ada digantikan oleh situasi yang dianggap lebih memenuhi harapan. Altbach (1981), mengatakan bahwa mahasiswa di negara manapun merupakan bagian dari kelas menengah, dan mereka cenderung bertindak sebagai 'hati nurani' rakyat.

Aksi unjuk rasa oleh buruh tentu disebabkan karena tidak terdapatnya keseimbangan antara harapan dengan kenyataan yang terkombinasi dalam suatu kondisi, dimana keadaan tersebut bisa diformulasikan sebagai kepuasan kerja yang rendah.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan para sopir menurut Noerachman (1989) dalam penelitiannya adalah lebih dikarenakan untuk mendapatkan penumpang atau untuk mempertahankan jumlah perolehan penumpang. Oleh karena itu, bila terdapat kondisi yang dirasa mengganggu, maka mereka tak akan segan-segan untuk melakukan aksi unjuk rasa yang dapat menjurus pada konflik. Mengingat para sopir lebih cenderung untuk menghindari resiko yang lebih tinggi dalam kehidupan sehari-hari, maka konflik yang dilakukan masih cenderung dapat dikompromikan secara damai.

Timbulnya unjuk rasa warga kampung cenderung bersumber dari kota itu sendiri yang banyak menyimpan sejumlah persoalan. Banyak permasalahan yang timbul di lingkungan perkotaan, tidak hanya masalah di bidang politik itu sendiri, bahkan masalah sosial dan ekonomi dapat mengandung dimensi politik. Dalam hal

ini, warga perkotaan memiliki andil besar sebagai penghuni kota terhadap berbagai permasalahan tersebut.

Menurut Prof. Ramlan Surbakti, terdapat empat kelompok permasalahan di perkotaan yang dikategorikan sebagai masalah politik, yaitu: Pertama; dalam hal produksi dan distribusi pelayanan publik, berupa kebutuhan dasar ataupun infrastruktur. Sebab salah satu sumber konflik di perkotaan adalah menyangkut bagaimana fungsi pelayanan itu seyogyanya diproduksi dan didistribusi sehingga semua warga kebagian dalam jumlah serta mutu yang sama. Dua; Isu mengenai siapa yang harus membiayai pelayanan publik tersebut, seperti menyangkut keuangan daerah yang pada akhirnya menentukan kelompok masyarakat yang mana dan pemerintah tingkat yang mana akan membiayai jenis pelayanan publik yang mana. Karena itu yang diperdebatkan bukan hanya pembagian beban membiayai pelayanan publik antara pemerintah pusat, Pemda Tk. I dan Tk. II, tetapi juga menyangkut distribusi beban di antara warga kota yang memiliki kemampuan ekonomi dan/atau daya konsumsi yang berbeda. Inilah yang mendasari mengapa warga kota pernah melakukan protes terhadap tarif segala macam pajak, retribusi dan pungutan resmi lainnya. Tiga; persoalan penataan struktur pemerintahan kota, seperti dualisme atau fragmentarisme kewenangan, desentralisasi atau sentralisasi, dan swastanisasi atau birokratisasi. Perdebatan tentang struktur pemerintahan kota pada dasarnya berkisar pada tujuan pemerintahan yang hendak dicapai, apakah lebih menekankan efisiensi atau pada

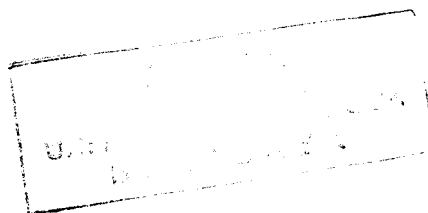
kebaikan bersama. Empat, Masalah lokus kewenangan membuat keputusan dan dasar legitimasi kewenangan, yakni siapa yang senyatanya membuat keputusan tentang kebijakan perkotaan. Diketahui, secara formal kewenangan membuat keputusan memang terletak lembaga pemerintah, tapi secara empirik suatu keputusan publik dapat saja dibuat oleh elit atau kelompok kekuasaan lain yang tak memiliki kewenangan formal. Misalnya siapa yang memiliki kewenangan membuat keputusan mengenai perubahan peruntukkan lahan. Disatu sisi pihak yang menjadi penentu arah perkembangan dan pemanfaatan ruang kota sering adalah kekuatan komersial atau swasta, disisi yang lain, kekuatan massa \_\_terutama kelompok marginal kota\_\_ acapkali menjadi pihak yang sama sekali tidak diperhitungkan dalam pengaturan dan pembagian spasial/ruang kota. Dikatakan kembali, faktor penyerahan harga dan peruntukkan tanah kepada mekanisme pasar adalah merupakan salah satu sebab yang membuat masalah pertanahan di kota semakin runyam (McAuslan, 1996).

Jika hal diatas lebih membicarakan pada sebab-sebab terjadinya unjuk rasa yang secara konkrit yang tertuang dari isu/tuntutan yang diperjuangkan, maka dalam segi sasaran/tempat unjuk rasa, sudah merupakan konsekuensi logis bila dilakukan di tempat-tempat yang sekiranya aspirasi mereka diperhatikan (mendapat tempat untuk di dengarkan), antara lain ialah; di tempat yang menjadi asal muasal/pemicu konflik, tempat terdapatnya individu yang berkompetabel mengenai persoalan yang timbul/dapat memberi alternatif jalan keluar terhadap permasalahan (*decition*

*maker*), tempat yang banyak mendapat perhatian masyarakat umum, tempat berkumpulnya para aparat penegak keamanan dan ketertiban, tempat-tempat yang dinilai mempunyai arti atau makna tertentu (misalnya: makam, tugu atau monumen, tempat ibadah dan lain-lain). Tentu saja tempat atau sasaran yang didatangi para pengunjung rasa disesuaikan dengan permasalahan yang tengah diperjuangkan.

Berbicara mengenai jumlah massa yang dikerahkan pada aksi unjuk rasa, mau tidak mau harus melihat adanya organisasi yang berfungsi sebagai sarana memperjuangkan kepentingan-kepentingan. Asosiasi atau organisasi bercirikan pada keanggotaannya yang bersifat sukarela dan mempunyai kepentingan bersama yang sangat jelas terbatas. Asosiasi yang sangat menonjol diperkotaan dapat dibedakan menjadi tiga menurut Joan M. Nelson (1979), yakni asosiasi teritorial, okupasi dan profesi. Untuk selanjutnya sebutan asosiasi lebih tepat digunakan sebagai wadah bagi para buruh, sopir dan warga kampung, sedangkan istilah organisasi lebih dipakai sebagai wadah perjuangan di kalangan mahasiswa. Menurut Ramlan, tindakan kolektif dengan mengerahkan massa yang begitu besar lebih mudah dilakukan apabila mereka memiliki wadah perjuangan kepentingan yang jelas, dengan asumsi hal ini juga akan berlaku sebaliknya pada kondisi yang berlawanan seperti tersebut di atas.

Mengenai cara unjuk rasa, lebih mengarah/menunjuk kepada variasi dalam penyampaian aspirasi selain menyampaikannya dengan jalan biasa (menggelar



poster, sependuk disertai dengan orasi). Sehingga, sebenarnya banyak cara yang bisa digunakan, tergantung pada kesepakatan para pelaku unjuk rasa.

Sedangkan kerugian harta benda maupun korban fisik yang ditimbulkan, adalah bentuk dampak yang sesekali ditimbulkan dari aksi unjuk rasa itu sendiri.

Kecenderungan unjuk rasa, khususnya di daerah perkotaan, menarik untuk disimak. Kekuatan massa \_\_terutama kelompok marginal kota\_\_ acapkali menjadi pihak yang sama sekali tidak diperhitungkan dalam pengaturan dan pendistribusian sumber-sumber. Jay Forester, dalam bukunya yang berjudul *Urban Dynamic* mengatakan; perkembangan kota manapun di dunia ini pada titik tertentu pasti akan mencapai klimaksnya, dan lambat laun kota akan semakin merosot, rusak dan kacau. Kota yang semakin metropolis, menurut Forester, pada batas tertentu justru akan mengalami stagnasi dimana berbagai permasalahan yang timbul di kota sudah berada di luar jangkauan dan kontrol pemerintah (Herlianto, 1986:103). Gejala-gejala yang akhir-akhir ini banyak terjadi, seperti meningkatnya masalah konflik tanah, pengangguran yang memberi dampak pada meningkatnya kriminalitas, dan berbagai bentuk disorganisasi kota lainnya.

Kecenderungan perkembangan kota yang terjadi di negara dunia ke-tiga menurut aliran Chicago adalah timbulnya apa yang disebut dengan sentralisasi dan segregasi. Sentralisasi merupakan kecenderungan lembaga-lembaga dan jasa-jasa tertentu untuk bertempat dekat pada pusat transportasi dan komunikasi penting,

sedang agregasi merupakan proses dimana daerah-daerah alamiah semakin mempunyai sifat homogen. Kelompok-kelompok tertentu mempunyai ciri-ciri ras, ekonomi atau sosial yang sama dan masing-masing bertempat tinggal dalam daerahnya sendiri di dalam kota. Menurut Gist dan Fava (1964) segregasi juga bisa diartikan sebagai hasil dari proses kompetisi yang terjadi di antara penghuni kota (Nas, 1984: 25). Segregasi bisa terjadi akibat paksaan dan hasil perkembangan kekuatan komersial, juga bisa atas inisiatif atau kemauan sendiri.

Senada dengan Jay Forester, Mc Auslann (1986), Hauser (1985), dan Evers (1989) adalah beberapa diantara pakar yang menggambarkan bagaimana akibat obsesi yang terlalu menggebu untuk membangun kota menjadi metropolis, tidak hanya menimbulkan urbanisasi berlebih dan pemekaran horisontal fisik yang kurang terkendali, tetapi juga konflik yang intens.

## BAB III

### TUJUAN DAN MANFAAT

#### 111.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fenomena unjuk rasa mahasiswa, buruh/karyawan, sopir dan warga kampung secara terperinci yang berkembang di daerah perkotaan. Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mendeskripsikan pola penyampaian aspirasi para pengunjung rasa, yaitu tuntutan/isu yang diperjuangkan, sasaran tempat unjuk rasa, cara-cara yang ditempuh, jumlah massa yang dikerahkan dan kerugian harta benda serta korban fisik yang ditimbulkan.
2. Dari pola yang di dapat akhirnya di coba mendeskripsikan tujuan jangka panjang dari perkembangan unjuk rasa mahasiswa, buruh/karyawan, sopir dan warga kampung di masa datang.

#### 111.2. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan analisis penting tentang pola unjuk rasa mahasiswa, buruh/karyawan, sopir

dan warga kampung di daerah perkotaan, khususnya yang terjadi sebelum masa reformasi dan sesudahnya.

2. Disamping itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sebuah masukan dalam pembuatan *policy*/kebijakan.



## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### IV. 1. Definisi Operasional

1. Unjuk rasa atau yang bisa dipadankan dengan istilah demonstrasi adalah protes yang dilakukan oleh beberapa hingga banyak orang karena tidak puas terhadap suatu permasalahan.
2. Mahasiswa adalah suatu kelompok yang eksklusif, memiliki karakteristik khas yang berbeda dengan kelompok-kelompok lain, seperti; umur yang relatif muda, memiliki pendidikan dan idealisme yang relatif tinggi.
3. Buruh/karyawan adalah setiap orang yang bekerja pada seorang majikan untuk mendapatkan upah yang merupakan sumber utama bagi kehidupan dan terikat oleh hubungan.
4. Sopir adalah seseorang yang pekerjaannya menjalankan mobil, dalam hal ini mobil penumpang umum.
5. Warga kampung adalah suatu kelompok masyarakat yang menjalani hidupnya dalam lingkungan tertentu (kampung) dan cenderung memiliki sifat komunal.
6. Pola unjuk rasa adalah gambaran dari bentuk-bentuk yang ditampilkan tiap-tiap jenis unjuk rasa sehingga ditemukan perbedaan, antara lain; mengenai tuntutan/isu, tempat sasaran, cara-cara yang digunakan, jumlah massa yang dikerahkan, macam kerugian harta benda dan korban fisik yang ditimbulkan.
7. Kota adalah tempat berkumpulnya segala aktifitas/kegiatan kehidupan dengan segala macam konflik yang terkandung, termasuk kegiatan meluapkan perasaan ketidakpuasaan.

## **IV. 2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dipusatkan di Surabaya. Dipilihnya Surabaya sebagai lokasi penelitian, karena merupakan kota terbesar di Jawa Timur sekaligus pula dikenal sebagai kota yang mempunyai dinamika interaksi masyarakatnya yang tinggi, yang secara otomatis memiliki kecenderungan besar memunculkan aksi unjuk rasa.

## **IV.3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diperoleh sebagian besar dari surat-surat kabar yang terbit di Surabaya, antara lain: Surat Kabar Surabaya Post, Jawa pos, Memorandum, Surya dan Suara Indonesia. Dipilihnya surat kabar tersebut, karena berita-berita lokal (di Surabaya) secara otomatis sebagian besar ter-ekspose. Guna mendukung kelengkapan dan akurasi, peneliti juga melakukan wawancara (dengan kuesioner terbuka) kepada lembaga-lembaga yang banyak terkait langsung dengan aksi unjuk rasa, yaitu: LBH Surabaya, SPSI dan Organda.

Data-data tentang unjuk rasa dikumpulkan sejak tahun 1995 sampai dengan September 1999, dengan maksud, tahun-tahun tersebut mewakili peristiwa unjuk rasa pada masa orde baru (1995-1996), saat peralihan dari orde baru ke orde reformasi (1997) dan orde reformasi (1998-1999).

## **IV.4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Artinya, data-data yang telah diperoleh dikumpulkan, kemudian diseleksi dan dianalisis secara kualitatif guna memberikan gambaran yang jelas dari fenomena yang diteliti. Yang menjadi fokus dari analisa kualitatif ini sesungguhnya pada penunjukkan makna deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Data-data yang ada selanjutnya disusun ke dalam pola tertentu, kategori tertentu, fokus tertentu, tema tertentu atau pokok permasalahan tertentu (Sanapiah Faisal, 1989:269).

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Unjuk rasa sering terjadi di kota besar, hal ini sangat mungkin terjadi karena kota sebagai tempat berpusatnya berbagai aktifitas, dengan semua sarana dan prasarana yang menunjang, cenderung menyimpan banyak persoalan. Dalam hal penduduk, penduduk kota relatif padat dari pada di desa-desa, mereka memiliki mobilitas tinggi, penuh dinamika dan pada akhirnya lebih responsif terhadap segala permasalahan yang timbul. Segala persoalan yang dirasakan mengganggu akan cepat direspon, ini membuat kota mempunyai peluang lebar bagi terjadinya unjuk rasa. Data unjuk rasa yang berhasil diekspose untuk wilayah Surabaya sejak tahun 1995 sampai September 1999 memperlihatkan bahwa; tahun 1995 terdapat 59 kasus, tahun 1996 terdapat 44 kasus, tahun 1997 terdapat 40 kasus, tahun 1998 terdapat 226 kasus dan bulan Januari hingga September 1999 terdapat 191 kasus. Diantaranya, sebanyak 56,07% kasus dilakukan oleh mahasiswa, 23,04% oleh buruh, 4,64% oleh sopir serta 16,25% oleh warga kampung.

Unjuk rasa sebenarnya banyak dilakukan ketika suatu masalah mendesak untuk segera diselesaikan, misalnya ketika tuntutan akan reformasi total dilontarkan pada tahun 1998 terjadi lonjakan tajam gelombang unjuk rasa. Tentang pelaku unjuk rasa, data

diatas menyebutkan bahwa mahasiswa adalah pelaku yang paling sering menggelar aksi demonstrasi, hal ini bisa dipahami karena secara umum hakekat dari gerakan politik mahasiswa sendiri adalah untuk menumbuhkan perubahan sosial dan mendorong perubahan politik.

Berikut, lebih jauh akan dibahas mengenai; tuntutan-tuntutan/isu yang diperjuangkan pelaku unjuk rasa, sasaran tempat unjuk rasa, cara-cara yang ditempuh, jumlah massa yang dikerahkan dan kerugian harta benda serta korban fisik yang ditimbulkan pada aksi unjuk rasa.

## **V.1. Pola Penyampaian Aspirasi Pelaku Unjuk Rasa**

### ***V.1.1. Tuntutan-tuntutan/Isu-isu***

Mahasiswa dalam melakukan aksinya, lebih didasarkan pada orientasi isi perjuangan yang jelas, untuk itu mahasiswa dapat menghidupkan massa yang luas dengan observasinya yang logis dan empiris (ideologi utopian). Keberhasilan ideologi ini diukur melalui sejauh mana mahasiswa berhasil dalam memperjuangkan tuntutan-tuntutannya. Dalam kondisi yang ekstrim, mahasiswa bisa berperan sebagai seorang 'agigator' untuk menggerakkan massa dengan obyek masyarakat yang tertekan. Tuntutan/isu reformasi total sebagai misal, merupakan output dari pernyataan diatas, rakyat digunakan sebagai basis perjuangan dan tujuan perjuangan itu sendiri. Mahasiswa dinilai memiliki gaya kepemimpinan yang khas, punya kemampuan administratif,

rutinitas dan konsekuensi pada cita-cita. Sejak awal pemerintahan orde baru hingga masa reformasi sekarang ini, aksi mahasiswa selalu diwarnai oleh masalah-masalah politik dan birokrasi disamping idealisme tentang kepedulian sosial. Data yang diperoleh sejak tahun 1995 sampai dengan September 1999 memperlihatkan bahwa tuntutan akan reformasi total merupakan isu yang mengedepan (29,62%), keprihatinan terhadap situasi negara mendorong mahasiswa menuntut perbaikan situasi politik (7,96%), pelanggaran HAM (5,41%), mendesak dilaksanakannya Sidang Istimewa (4,14%), mengecam segala bentuk intervensi aparat terhadap mahasiswa (3,82%) dan berbagai isu lainnya (45,55%), sedangkan isu yang tak berhasil diidentifikasi (3,50%). Berikut ditampilkan tabel tentang tuntutan/isu yang diperjuangkan mahasiswa di Surabaya per tahun.

**Tabel. II**  
**Tuntutan/Isu Unjuk Rasa Mahasiswa di Surabaya**  
**(1995 s/d. September 1999)**

No.	Isu/Tuntutan	Tahun					Jumlah
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Reformasi total	0	0	0	91	2	93
2	Perbaiki situasi politik	1	0	1	21	2	25
3	Pelanggaran HAM	0	2	3	1	11	17
4	Mendesak dilaksanakannya Sidang istimewa	0	0	0	13	0	13
5	Kecam Intervensi aparat terhadap mahasiswa	5	1	0	1	5	12
6	Cabut per-Undang-undangan	0	0	1	0	9	10
7	Lisut tuntas KKN Soeharto dan kroni	0	0	1	0	10	11
8	Tolak campur tangan negara luar terhadap Indonesia	0	0	0	3	6	9
9	Turunkan harga sembako	0	0	0	8	0	8
10	Tuntut mundur Presiden Soeharto	0	0	0	8	0	8
11	Cabut dwifungsi TNI	0	0	0	0	7	7
12	Protes tatanan manajemen di tubuh Perguruan Tinggi	0	1	1	3	1	6
13	Tingkatkan supremasi hukum	0	0	1	2	3	6
14	Protes pungutan dana di Perguruan Tinggi (P.T.)	1	0	1	0	3	5
15	Menuntut pembebasan aktifis	0	2	0	0	3	5
16	Protes harga BBM	0	0	0	5	0	5
17	Protes struktur perwakilan mahasiswa di P.T.	4	0	0	0	0	4
18	Perbaiki sistem pendidikan dan pengajaran	1	0	1	1	1	4
19	Reformasi tanpa kekerasan	0	0	0	0	4	4
20	Protes pencemaran lingkungan di Surabaya	0	0	0	0	4	4
21	Protes masalah OPDIK/OPSPEK	1	0	1	0	1	3
22	Perbaiki nasib buruh	0	2	0	0	1	3
23	Kasus tanah	0	1	0	0	2	3
24	Diskualifikasi Golkar	0	0	0	0	3	3
25	Demokratisasi	1	0	1	0	1	3
26	Kecam kongres PDI di Medan	0	2	0	0	0	2
27	Penolakan dialog mahasiswa-presiden	0	0	0	2	0	2
28	Tolak kembalinya kekuatan pro status Quo	0	0	0	0	2	2
29	Tentukan nasib Timor-Timur	0	0	0	0	2	2
30	Protes pelaksanaan penjarangan calon rektor	0	0	1	0	0	1
31	Korupsi di Perguruan Tinggi	1	0	0	0	0	1
32	Kebebasan pers	1	0	0	0	0	1
33	Masalah pemberangkatan Calon Jemaah Haji	1	0	0	0	0	1
34	Protes provokasi antar mahasiswa	1	0	0	0	0	1
35	Protes pemukulan antar aktifis	1	0	0	0	0	1

36	Protes diskriminasi rekrutmen PNS	0	1	0	0	0	1
37	Tolak intervensi militer di bidang politik	0	1	0	0	0	1
38	Protes kepemimpinan di tubuh P.T.	0	0	0	1	0	1
39	Penolakan pertanggungjawaban presiden	0	0	0	1	0	1
40	Protes mundurnya Soeharto tak konstitusional	0	0	0	1	0	1
41	Tuntut diadakan pemilu ulang	0	0	0	1	0	1
42	Tuntut pemisahan polisi terhadap ABRI	0	0	0	1	0	1
43	Kecam para menteri yang boncong reformasi	0	0	0	1	0	1
44	Tuntut pembebasan napi dan tapol	0	0	0	1	0	1
45	Tolak capres Habibie	0	0	0	0	1	1
46	Presiden dipilih rakyat secara langsung	0	0	0	0	1	1
47	Berantas pornografi	0	0	0	0	1	1
48	Protes tradisi pesangon di DPRD KMS	0	0	0	0	1	1
49	Pertahankan Tim-Tim tetap bagian Indonesia	0	0	0	0	1	1
50	Dukung Cak Narto jadi walikota	0	0	0	0	1	1
51	Ganti Wiranto/akhiri dominasi Angkatan Darat (A.D.)	0	0	0	0	1	1
52	Pedul AIDS	0	0	0	0	1	1
53	Pemotongan dana nasabah	0	0	0	0	1	1
54	Tak tendentifikasi	0	0	3	4	4	11
	<b>Jumlah</b>	19	13	16	170	95	314

Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Jawa Pos dan Surya

Tentang isu unjuk rasa mahasiswa, dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: Isu lokal, isu lokal diberi pengertian sebagai isu yang berakar pada persoalan-persoalan lokal/daerah setempat, misalnya; protes pungutan dana oleh perguruan tinggi tertentu, protes persoalan tanah dan lain-lain, ataupun isu nasional yang digunakan untuk menyoal keadaan di daerah setempat, misalnya tuntutan demokratisasi di tubuh perguruan tinggi setempat, protes pelaksanaan penjarangan calon rektor di sebuah perguruan tinggi dan lain-lain. Isu nasional, adalah isu yang berbasis pada persoalan-persoalan nasional, misalnya; tuntutan reformasi total, mendesak dilaksanakannya Sidang Istimewa, cabut

dwi fungsi ABRI dan lain-lain. Isu internasional, adalah isu yang mempunyai skop hingga melewati batas satu negara, misalnya, penolakan campur tangan AS (Interfed) untuk mengatasi Timor-Timur. Tabel III berikut menyajikan orintasi isu unjuk rasa mahasiswa di Surabaya secara lengkap.

**Tabel. III**  
**Orietasi Isu Unjuk Rasa Mahasiswa di Surabaya**  
**(1995 s/d. September 1999)**

No.	Tahun	Isu				Jumlah
		Lokal	Nasional	Internasional	Tak teridentifikasi	
1	1995	11	8	0	0	19
2	1996	3	10	0	0	13
3	1997	6	9	1	0	16
4	1998	11	155	4	0	170
5	1999	18	71	5	2	96
	Jumlah	49	253	10	2	314

Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Jawa Pos dan Surya

Dari Tabel III dapat diketahui bahwa mahasiswa sering menggunakan isu-isu yang me-nasional (80,57%), kemudian isu yang bersifat lokal hanya digunakan sebesar 15,61%, isu internasional 3,18% dan isu yang tak berhasil diidentifikasi 0,64%. Sumbangan terbesar dari isu yang berskala nasional terjadi pada tahun 1998 (155 kasus), dengan tuntutan akan 'reformasi total'.

Di lain pihak, ternyata buruh lebih responsif terhadap masalah upah, karena memang letak persoalan buruh adalah pada masalah 'perut'. Tuntutan akan kenaikan upah merupakan tuntutan yang menduduki prosentase tertinggi (17,83%), kenaikan uang



tunjangan \_\_ berupa uang premi, transport, makan, shift, insentif/bonus, servis dan lain-lain\_\_ (15,50%). Protes pemutusan hubungan kerja secara sepihak (7,75%), tuntutan pemberian THR, tuntutan pesangon bagi karyawan ter-PHK serta meminta kejelasan status karyawan masing-masing sebesar 6,20%, protes skorsing karyawan (5,43%). Isu buruh yang lain selain tersebut diatas sebanyak 30,24%, sementara isu yang tak teridentifikasi sebesar 4,65%. Secara lengkap isu/tuntutan yang diperjuangkan oleh buruh tertuang dalam Tabel IV.

**Tabel. IV**  
**Tuntutan/Isu Unjuk Rasa Buruh/Karyawan di Surabaya**  
**(1995 s/d. September 1999)**

No.	Isu/Tuntutan	Tahun					Jumlah
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Kenaikan upah	2	5	4	4	8	23
2	Kenaikan uang tunjangan	2	0	1	5	12	20
3	Protes PHK sepihak	0	1	1	2	5	10
4	Tuntut pemberian THR	4	0	0	0	4	8
5	Tuntut pesangon karyawan ter-PHK	1	0	1	1	5	8
6	Minta kejelasan status	5	0	0	1	1	8
7	Protes skorsing karyawan	0	2	2	0	3	7
8	Tuntut pimpinan yang sewenang-wenang	0	0	1	1	2	4
9	Tuntut pembayaran upah	1	1	0	0	2	4
10	Tuntut pembenahan manajemen	1	0	2	0	1	4
11	Kenaikan THR	2	0	1	0	0	3
12	Tolak pemotongan gaji	0	0	0	0	2	2
13	Protes sikap personalia	1	0	0	0	1	2
14	Tolak mutasi karyawan	0	1	1	0	0	2
15	Protes pelaksanaan UU ketenagakerjaan	0	1	0	1	0	2
16	Tuntut mundur beberapa staf perusahaan	0	0	0	0	1	1
17	Tolak penggantian bos	0	0	0	0	1	1
18	Bebaskan direktur yang ditahan	0	0	0	0	1	1
19	Pembentukan SPSI	1	0	0	0	0	1
20	Reorganisasi perusahaan	1	0	0	0	0	1
21	Protes penahanan beberapa buruh	0	1	0	0	0	1
22	Tolak target perusahaan yang tinggi	0	1	0	0	0	1
23	Menuntut dilibatkan jamsostek	0	0	1	0	0	1
24	Cuti tahunan	0	0	0	1	0	1
25	Tuntut libur dalam masa pemilu 99	0	0	0	0	1	1
26	Memperanyakan penutupan pabrik	0	0	0	0	1	1
27	Protes hakim yang memihak pengusaha	0	0	0	0	1	1
28	Upah sesuai masa kerja	0	0	0	0	1	1
29	Tuntut ganti rugi penyegelan sementara	0	0	0	0	1	1
30	Minta diperkerjakan kembali	0	0	0	0	1	1
31	Menghujat pejabat yang tak memihak buruh	0	0	0	0	1	1
32	Tak teridentifikasi	0	0	0	2	4	6
	<b>Jumlah</b>	22	13	15	18	61	129

Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Surya dan Memorandum

Tuntutan utama sopir memang agak berbeda dengan buruh, dalam arti tuntutan tersebut berkisar paling tidak pada usaha mempertahankan pendapatan, dan sejauh ada hal-hal yang dapat mengganggu penurunan perolehan pendapatan, mereka akan melakukan aksi. Masalah pemberian ijin trayek baru merupakan tuntutan yang dominan disuarakan (42,31%), kemudian masalah kenaikan setoran/batas premi (11,54%), protes perlakuan aparat (11,54%) dan masalah perubahan jalur \_\_jalur yang berhimpitan\_\_ (7,69%). Selain itu, tuntutan/isu yang pernah dilontarkan walaupun hanya sekali (3,85%) antara lain; tuntutan tentang kejelasan uang simpanan wajib, protes perlakuan pengurus perusahaan, pemotongan jalur, reformasi kepengurusan SPSI perusahaan, protes harga BBM tanpa perubahan argo, rusaknya rute jalan dan tingginya retribusi.

**Tabel. V**  
**Tuntutan/Isu Unjuk Rasa Sopir di Surabaya**  
**(1995 s/d. September 1999)**

No.	Isu/Tuntutan	Tahun					Jumlah
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Masalah pemberian ijin trayek baru	8	2	3	0	0	11
2	Kenaikan setoran/batas premi	1	1	0	0	1	3
3	Protes perlakuan aparat	0	2	1	0	0	3
4	Perubahan jalur	0	0	1	1	0	2
5	Menuntut kejelasan uang simpanan wajib	1	0	0	0	0	1
6	Protes perlakuan pengurus perusahaan	0	1	0	0	0	1
7	Pemotongan jalur	0	0	0	1	0	1
8	Reformasi kepengurusan SPSI perusahaan	0	0	0	1	0	1
9	Protes harga BBM tanpa perubahan argo	0	0	0	0	1	1
10	Protes rusaknya rute jalan	0	0	0	0	1	1
11	Tingginya retribusi	0	0	0	0	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>26</b>

Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Jawa Pos, Surya, SI dan Memorandum

Masalah tanah yang sering terjadi di perkotaan, adalah faktor yang menjadikan unjuk rasa warga kampung marak. Dari jumlah kasus yang ada, tuntutan yang berkaitan dengan tanah sebesar 62,64% dan tuntutan lainnya selain tanah yaitu 37,36%. Masalah tanah sendiri bisa dirinci lebih jauh; protes penjualan tanah dan menuntut dikembalikannya status tanah sengketa merupakan tuntutan yang paling banyak dilontarkan oleh warga kampung. Selain itu, tuntutan untuk meminta ganti rugi tanah yang 'sesuai' menduduki peringkat kedua, harga tanah yang sesuai di sini bisa diartikan bahwa harga tanah tersebut dihargai sesuai dengan harga tanah yang berlaku di pasaran, juga bisa diartikan bahwa harga tanah sesuai dengan kesepakatan yang di buat termasuk dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut dipakai untuk kepentingan umum, pemerintah atau swasta. Tuntutan yang menduduki peringkat ketiga adalah mengenai pengusuran tanah. Sebenarnya tuntutan yang diperjuangkan warga kampung tersebut mengenai soal tanah bermuara pada satu sumber, yaitu mereka acap kali berberposisi sebagai pihak yang dirugikan, dan jarang memiliki posisi *bargaining* yang seimbang di antara pihak-pihak yang berkepentingan bahkan terlantar. Berikut Tabel VI menyajikan tuntutan/isu unjuk rasa warga kampung di Surabaya.

**Tabel. VI**  
**Tuntutan/Isu Unjuk Rasa Warga Kampung di Surabaya**  
**(1995 s/d. September 1999)**

No.	Isu/Tuntutan	Tahun					Jumlah
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Kasus tanah:						
	a. Protes penjualan tanah	3	1	0	2	2	6
	b. Tuntut dikembalikannya tanah sengketa	0	0	0	7	1	8
	c. Tuntut ganti rugi tanah yang sesuai	3	0	0	1	3	7
	d. Tuntut penggusuran tanah	1	0	1	1	2	5
	e. Kembalikan fungsi tanah sengketa	1	1	0	1	0	3
	f. Pelaku ingkar janji/melanggar kesepakatan	1	0	0	0	2	3
	g. Protes penyerobotan/perampasan	0	0	0	3	0	3
	h. Protes pengerukan tanah	1	1	0	0	0	2
	i. Tuntut sertifikat tanah	0	0	0	2	0	2
	j. Tuntut pembayaran sisa tanah	0	1	0	1	0	2
	k. Tuntut penyediaan tanah untuk fasilitas Pengganti	0	0	0	0	2	2
	l. Protes dampak reklamasi	0	1	0	0	0	1
	m Tuntut pembatalan ruislag/tukar guling	0	0	0	0	1	1
	n. Tak teridentifikasi	0	2	0	5	3	10
2	Protes ketidaklancaran air bersih	0	3	1	0	0	4
3	Protes tindakan aparat	0	0	1	1	2	4
4	Menuntut ditutupnya tempat judi	0	0	0	1	2	3
5	Tuntut penurunan harga sembako	0	0	0	2	0	2
6	Tuntut keterbukaan pembangunan desa	0	0	0	2	0	2
7	Protes penganalayaan pembantu RT	0	0	0	1	1	2
8	Tuntut turunnya lurah	0	0	0	1	1	2
9	Protes mutasi lurah sepihak	0	0	0	2	0	2
10	Tuntut pembuatan saluran air pada devip.	0	0	0	0	2	2
11	Mendukung Basofi sebagai gubernur	0	0	0	1	0	1
12	Protes rusaknya jalan karena kendaraan	0	1	0	0	0	1
13	Protes perluasan pabrik	0	1	0	0	0	1
14	Protes pendirian rumah sakit	0	0	1	0	0	1
15	Tuntut dibebaskannya warga yang demo	0	0	0	1	0	1
15	Tuntut pengucuran dana JPS	0	0	0	0	1	1
17	Protes pemotongan dana bantuan	0	0	0	0	1	1
18	Tuntut penyerahan pengelolaan pasar	0	0	0	0	1	1
19	Protes kelangkaan minyak	0	0	0	0	1	1
20	Lakukan penjarangan ulang calon walikota	0	0	0	0	1	1
21	Protes hakim yang memihak tergugat	0	0	0	0	1	1
	<b>Jumlah</b>	10	12	4	35	30	91

Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Jawa Pos, SI dan Memorandum

Dapat dikatakan kembali, isu yang dominan disuarakan pelaku unjuk rasa adalah sesuai dengan karakteristik yang melingkupi kelompok itu sendiri dipadukan dengan kondisi yang berkembang \_\_dirasa perlu untuk dirubah\_\_, mahasiswa menitikberatkan pada upaya perbaikan keadaan sosial, ekonomi dan politik negara dengan menuntut reformasi secara total, isu perbaikan kondisi kehidupan melalui perjuangan menuntut kenaikan upah oleh buruh, isu mempertahankan jumlah penumpang dengan mempermasalahkan pemberian ijin trayek baru oleh para sopir dan isu untuk mempertahankan hak milik yang diinjak-injak, misalnya pada khusus tanah, oleh warga kampung.

### *V.1.2. Tempat Sasaran*

Kantor DPRD merupakan alternatif kedua yang dijadikan sasaran unjuk rasa oleh para mahasiswa dan buruh, serta merupakan tempat tujuan utama bagi para warga kampung, sementara sopir menganggap bahwa kantor DPRD merupakan tujuan penting untuk melancarkan aksi namun bukan tempat penyampaian aspirasi yang utama. Adalah wajar jika menjadikan DPRD sebagai tempat sasaran penting bagi para pengunjuk rasa, karena DPRD memang merupakan forum publik, tempat untuk membahas isu-isu publik. Segala permasalahan sosial ekonomi \_\_kecuali masalah politik\_\_ yang ada memang tidak langsung berkaitan dengan proses politik, dalam arti solusinya tak terletak di tangan pemda, namun tak dapat dipungkiri, masalah sosial dan ekonomi mengandung

dimensi politik. Masalah politik, dirumuskan sebagai semua permasalahan yang pemecahannya dicari melalui proses politik, dan tempat yang tepat guna membahas segala macam persoalan publik adalah DPRD. Dalam negara demokrasi, para wakil rakyat (DPRD) dipandang sebagai pihak yang bertindak atas nama publik. Karena itu ia perlu memberi perhatian khusus terhadap implementasi pelayanan publik di masyarakat. Sehingga ketika masyarakat \_\_warga kota\_\_ tidak puas terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah, mereka tentu akan berlari dan mengadu ke DPRD.

Selain DPRD, sasaran utama yang dijadikan tempat unjuk rasa adalah area/wilayah dimana ia berada. Karena memang area tersebut dipandang sebagai tempat yang banyak mendapat perhatian berbagai kalangan (misalnya di kampus), atau bahkan merupakan tempat dimana pihak pengambil keputusan juga berada disana (misalnya, pabrik/kantor). Ada pula tempat-tempat lain yang dijadikan sasaran penting, dalam hal ini disesuaikan dengan permasalahan/isu yang diperjuangkan, dengan pemikiran bahwa tempat tersebut memang benar-benar sesuai atau pas bagi penyampaian aspirasi bahkan penyelesaian masalah.

Pada unjuk rasa mahasiswa hampir separuh aksi yang dilakukan mengambil tempat di halaman kampus (45,86%), kantor DPRD menduduki tempat kedua (15,92%) dan tempat ketiga adalah halman rektorat (6,05%). Tempat-tempat yang dijadikan sasaran aksi unjuk rasa mahasiswa di Surabaya secara lengkap tertuang pada Tabel VII.

**Tabel. VII**  
**Tempat Sasaran Unjuk Rasa Mahasiswa di Surabaya**  
**(1995 s/d. September 1999)**

No.	Tempat/Sasaran	Tahun					Jumlah
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Halaman kampus	13	4	7	113	7	144
2	Kantor DPRD	1	3	2	18	26	50
3	Halaman rektorat	2	1	4	11	1	19
4	Kantor Konjen AS	0	0	1	4	8	13
5	Gedung Grahadl	0	0	0	2	11	13
6	Turun ke jalan	0	0	0	1	10	11
7	RRl	0	0	0	2	4	6
8	Halaman masjid	2	0	0	3	0	5
9	Kantor Polisi	0	0	0	2	2	4
10	Kantor kejaksaan tinggi	0	0	0	1	3	4
11	Balat Pernuda	1	0	0	0	2	3
12	Halaman rumah sakit	0	0	0	2	1	3
13	Kodam V Brawijaya	0	0	0	1	2	3
14	Kantor gubernur	0	1	0	1	0	2
15	Taman Bungkul	0	0	0	1	1	2
16	Kantor pemda	0	0	0	1	1	2
17	Kantor Depnaker	0	1	0	0	0	1
18	Taman Makam Pahlawan	0	1	0	0	0	1
19	Kantor DPD PDI	0	1	0	0	0	1
20	Kantor pengadilan negeri	0	0	1	0	0	1
21	Kantor Dpt. Pertambangan & energi	0	0	1	0	0	1
22	Kantor PMKRI	0	0	0	1	0	1
23	Kantor FK SMPT	0	0	0	1	0	1
24	Kantor APR-ASPR	0	0	0	1	0	1
25	Kantor Dewan Kesenian Surabaya	0	0	0	1	0	1
26	Kantor Pusura	0	0	0	1	0	1
27	Kantor SCTV	0	0	0	1	0	1
28	Hotel	0	0	0	1	0	1
29	BRI Tower	0	0	0	0	1	1
30	Kantor KPU	0	0	0	0	1	1
31	Monumen Tugu Pahlawan	0	0	0	0	1	1
32	Monumen Bambu Runcing	0	0	0	0	1	1
33	Monumen Tugu Pahl	0	0	0	0	1	1
34	Pondok pesantren	0	0	0	0	1	1
35	Kantor LBH	0	0	0	0	1	1



36	Graha Pena	0	0	0	0	1	1
37	Kantor Ditsospol	0	0	0	0	1	1
38	Kebun Binatang Surabaya	0	0	0	0	1	1
39	Kantor Ikatan Notaris Indonesia	0	0	0	0	1	1
40	Kantor Dinas Pertanian	0	0	0	0	1	1
41	Kantor Panwaslu	0	0	0	0	1	1
42	Pertokoan	0	0	0	0	1	1
43	Tak teridentifikasi	0	1	0	0	3	4
<b>Jumlah</b>		19	13	16	170	96	314

Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Jawa Pos dan Surya

Lokasi pabrik adalah tempat sasaran pertama yang dijadikan buruh ketika meluapkan tuntutan (58,14%), diikuti kemudian kantor DPRD (14,73%), kantor departemen tenaga kerja (13,95%), kantor kepolisian (3,10%). Kantor pengadilan negeri, kantor pemerintahan daerah (pemda) dan rumah bos masing-masing memiliki prosentase 1,55%, sedangkan kantor Lembaga bantuan Hukum (LBH), kantor gubernuran dan Grahadi masing-masing sebesar 0,78% serta tempat yang tidak teridentifikasi (3,10%). Tabel VIII akan menjelaskan tempat sasaran unjuk rasa buruh/karyawan di Surabaya berdasar jumlah kasus.

**Tabel. VIII**  
**Tempat Sasaran Unjuk Rasa Buruh/Karyawan di Surabaya**  
**(1995 s/d. September 1999)**

No.	Tempat/sasaran	Tahun					Jumlah
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Lokasi pabrik	12	9	8	5	41	75
2	Kantor DPRD	2	0	5	7	5	19
3	Kantor Depnaker	7	2	1	4	4	18
4	Kantor Kepolisian	0	1	0	0	3	4
5	Kantor Pengadilan Negeri	0	0	1	0	1	2
6	Kantor Pemda	1	0	0	1	0	2
7	Rumah Bos	0	0	0	0	2	2
8	Kantor LBH	0	0	0	0	1	1
9	Kantor gubernur	0	0	0	0	1	1
10	Gedung grahadi	0	0	0	0	1	1
11	Tak teridentifikasi	0	1	0	1	2	4
<b>Jumlah</b>		22	13	15	18	61	129

*Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Surya dan Memorandum*

Berbeda dengan mahasiswa dan buruh yang menjadikan tempat asal mereka sebagai sasaran utama, sopir lebih percaya pada kantor pemerintah, yaitu kantor pemda dan DLLAJR (masing-masing 23,08%) sebagai tempat untuk memperjuangkan tuntutan. Karena waktu terbanyak dari sopir adalah di jalanan sebagai tempat mengais rezeki, maka jalanan itu sendiri dijadikan pilihan ke tiga (15,38%), kantor DPRD sebagai tempat sasaran ke empat (11,54%), kantor perusahaan hanya dijadikan alternatif berikutnya setelah DPRD (7,69%) dan BAT, pintu tol gate, posko sopir masing-masing 3,85% serta tempat yang tak teridentifikasi (7,69%).

**Tabel. IX**  
**Tempat Sasaran Unjuk Rasa Sopir di Surabaya**  
**(1995 s/d. September 1999)**

No.	Tempat/Sasaran	Tahun					Jumlah
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Kantor Pemda	6	0	0	0	0	6
2	Kantor DLLAJR	0	2	3	1	0	6
3	Turun ke jalan	1	0	1	1	1	4
4	Kantor DPRD	0	1	0	1	1	3
5	Kantor Perusahaan	0	1	0	0	1	2
6	BAT	0	0	1	0	0	1
7	Pintu tol gate	0	0	0	0	1	1
8	Posko sopir	1	0	0	0	0	1
9	Tak teridentifikasi	0	2	0	0	0	2
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>26</b>

*Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Jawa Pos, Surya, SI dan Memorandum*

Warga kampung menganggap pihak DPRD paling bertanggung jawab terhadap semua permasalahan yang mereka hadapi, sebab disamping sebagai tempat tumpuan harapan utama, DPRD sekaligus dipandang sebagai tempat yang tepat guna penyelesaian masalah. Hal ini bisa dibuktikan, bahwa dari seluruh aksi unjuk rasa warga kampung yang ada, tempat yang paling sering dijadikan sasaran adalah kantor DPRD (30,77%), kantor kelurahan (13,19%), kantor pemda (7,69%), kantor developer (5,49%) dan tempat lain-lain sebesar 35,17%. Sedangkan tempat yang tidak dapat diidentifikasi (7,69%). Tabel. X berikut akan mengungkap secara lebih terinci mengenai tempat-tempat yang dijadikan sasaran para warga kampung Surabaya ketika melakukan unjuk rasa.

**Tabel. X**  
**Tempat Sasaran Unjuk Rasa Warga Kampung di Surabaya**  
**(1995 s/d. September 1999)**

No.	Tempat/Sasaran	Tahun					Jumlah
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Kantor DPRD	6	2	0	12	8	28
2	Kantor kelurahan	0	0	1	8	3	12
3	Kantor Pemda	1	0	0	4	2	7
4	Kantor developer	0	3	0	0	2	5
5	Kantor PDAM	0	3	1	0	0	4
6	Kantor kepolisian	0	0	0	2	2	4
7	Lahan sengketa	0	1	0	3	0	4
8	Rumah tersangka	0	0	0	1	2	3
9	Kantor Gubernur	1	1	0	1	0	3
10	Kantor pabrik	0	1	0	0	1	2
11	Gedung Grahadi	0	0	1	0	0	1
12	Balai kota	0	0	0	0	1	1
13	Kantor Pengadilan Negeri	0	0	0	0	1	1
14	Kantor Pertamina	0	0	0	0	1	1
15	Kantor Pembantu Walikota	0	0	0	0	1	1
16	Kantor Jasa Marga	0	0	0	0	1	1
17	Kodan V Brawijaya	0	0	0	1	0	1
18	Kampus	0	0	0	1	0	1
19	Kantor Perumka	0	0	1	0	0	1
20	Kantor kecamatan	0	0	0	1	0	1
21	Balai R/W	0	0	0	0	1	1
22	Rumah lurah/vaperat	0	0	0	0	1	1
23	Tak teridentifikasi	2	1	0	1	3	7
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>91</b>

*Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Jawa Pos, SI dan Memorandum*

Benang merah yang dapat ditarik adalah, jika pelaku unjuk rasa banyak terorientasi pada satu tempat dan di tempat itu sekaligus pula terdapat individu yang berkompetabel terhadap persoalan yang timbul/memecahkan masalah, maka saat itu pula

aksi unjuk rasa lebih banyak dilakukan di tempat itu. Misalnya, lokasi kampus oleh mahasiswa dan pabrik oleh buruh. Jika aktifitas/kegiatan pelaku unjuk rasa lebih banyak dilakukan di wilayah/area tertentu, dimana sebagian besar aktifitas mereka banyak bersangkutan-paut/bergantung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengenai itu (misalnya: pemerintah), maka pelaku aksi akan menjadikan tempat pihak-pihak yang berwenang menelurkan kebijakan/keputusan sebagai tempat sasaran utama. Fenomena ini tampak jelas pada unjuk rasa yang dilakukan sopir, sedangkan warga kampung lebih mempercayakan semua persoalannya di bawa ke tempat wakil rakyat yang memang sinkron terhadap masalah-masalah publik.

### *V.1.3. Cara-cara yang Ditempuh*

Cara-cara unjuk rasa atau yang dapat dikatakan sebagai variasi dalam penyampaian pendapat, cenderung dilatarbelakangi oleh upaya mencari jalan yang paling efektif agar aspirasi mereka dapat tersalurkan dengan baik, disamping pilihan untuk menghindari kejemuan dan berusaha lebih kreatif, juga pilihan tentang cara yang lebih disukai.

Dari data yang diperoleh, ternyata hampir separuh kasus unjuk rasa mahasiswa dilakukan dengan orasi, menggelar sepanduk/poster dengan mendatangi tempat-tempat yang di rasa strategis untuk menyampaikan tuntutan sebesar 42,36% dan sisanya sebesar 57,64% dituangkan dengan cara antara lain; orasi dan menggelar sepanduk di

kampus (34,08%), melakukan lengmarch (5,41%), apel akbar (2,55%), dialog (1,27%), menggelar pentas panggung/teater (0,96%) dan 0,64% masing-masing dilakukan dengan cara baca puisi, mogok makan, menggotong keranda mayat dan membakar mayatnya, mogok bicara, istighosah akbar, konvoi, tabligh akbar dan menggalang dana, sementara 0,32% masing-masing dilakukan dengan cara kemah keprihatinan, aksi duduk, aksi corat-coret sepanduk, menggelar pasar murah, tabur bunga di sungai, membawa patung-patung koran, membagi-bagikan buku, menggelar tulisan di atas kertas raksasa, tahlil akbar, membagi-bagikan brosur, membagi-bagikan bunga mawar di depan Grahadi, menandatangani resolusi secara bersama-sama, mendaftarkan Soeharto dan kroninya ke rumah sakit jiwa Menur dan membakar bendera Australia, Amerika serta PBB, sedangkan tak teridentifikasi (3,50%). Berikut Tabel. XI akan menyajikan data secara lebih konkrit tentang cara-cara yang digunakan pada unjuk rasa mahasiswa di Surabaya.

**Tabel. XI**  
**Cara-Cara yang Ditempuh pada Unjuk Rasa Mahasiswa di Surabaya**  
**(1995 s/d. September 1999)**

No.	Cara	Tahun					Jumlah
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Orasi, menggelar sepanduk/poster dengan mendatangi:						
	b. Kantor wakil rakyat	1	2	2	17	25	48
	c. Kantor rektorat	2	1	4	5	1	13
	d. Konjen AS	0	0	1	4	7	12
	e. Rumah gubernur	0	0	0	2	9	11
	f. Kantor RRI	0	0	0	2	4	6
	g. Kantor pengadilan/kejaksaan tinggi	0	0	1	1	3	5
	h. Kantor kepolisian	0	0	0	2	2	4
	i. Kantor aktifis mahasiswa/kepemudaan	0	0	0	4	0	4
	j. Masjid	2	0	0	2	0	4
	k. Kantor balai pemuda	1	0	0	0	2	3
	l. Kantor departemen pemerintahan	0	1	1	0	1	3
	m. Kodam V Brawijaya	0	0	0	1	2	3
	n. Kantor asosiasi	0	0	0	1	1	2
	o. Kantor pemda	0	0	0	1	1	2
	p. Kantor panwaslu	0	0	0	0	2	2
	q. Lapangan	0	0	0	0	2	2
	r. Monumen/tugu	0	0	0	0	2	2
	s. Kantor PDI	0	1	0	0	0	1
	t. Kantor gubernur	0	1	0	0	0	1
	u. Rumah sakit	0	0	0	1	0	1
	v. Kantor LBH	0	0	0	0	1	1
	w. Kantor swasta	0	0	0	0	1	1
	x. Kantor Ditsospol	0	0	0	0	1	1
	y. Pertokoan	0	0	0	0	1	1
2	Orasi, menggelar sepanduk/poster di kampus	11	3	7	80	6	107
3	Longmarch	0	1	0	6	10	17
4	ApeI akbar	0	0	0	8	0	8
5	Dialog	0	1	0	3	0	4
6	Menggelar pentas panggung/teater	0	0	0	3	0	3
7	Baca puisi	1	1	0	0	0	2
8	Mogok makan	0	0	0	2	0	2
9	Menggotong keranda mayat dan membakar mayatnya	0	0	0	2	0	2
10	Mogok bicara	0	0	0	2	0	2
11	Isi ghosah akbar	0	0	0	2	0	2

12	Konvol	0	0	0	1	1	2
13	Tabligh akbar	0	0	0	2	0	2
14	Menggalang dana	0	0	0	1	1	2
15	Kemah keprihatinan	1	0	0	0	0	1
16	Aksi duduk	0	0	0	1	0	1
17	Aksi corat-coret spanduk	0	0	0	1	0	1
18	Menggelar pasar murah	0	0	0	1	0	1
19	Tabur bunga	0	0	0	1	0	1
20	Membawa patung-patung koran	0	0	0	1	0	1
21	Membagi-bagikan buku	0	0	0	1	0	1
22	Menggelar karikatur raksasa	0	0	0	1	0	1
23	Menggelar tulisan di atas kertas raksasa	0	0	0	1	0	1
24	Tahill akbar	0	0	0	1	0	1
25	Membagi-bagi brosur	0	0	0	0	1	1
26	Membagi-bagi bunga mawar	0	0	0	0	1	1
27	Menandatangani resolusi bersama-sama	0	0	0	0	1	1
28	Mendaftarkan Soeharto dan kroninya ke rumah sakit jiwa	0	0	0	0	1	1
29	Membakar bendera negara asing	0	0	0	0	1	1
30	Tak teridentifikasi	0	1	0	6	4	11
<b>Jumlah</b>		13	13	15	170	95	314

Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Jawa Pos dan Surya

Tidak berbeda dengan mahasiswa, buruh juga suka melakukan cara orasi dan menggelar sepanduk dengan mendatangi tempat-tempat tertentu (38,76%). Cara kedua yang paling disukai adalah berorasi dan menggelar sepanduk di tempat kerja (27,13%), ketiga yaitu mogok kerja (26,36%), selanjutnya blokade pabrik (2,33%), cara menyandera staf dan pimpinan perusahaan, longmarch, aksi tutup mulut masing-masing sebesar 0,78% serta cara-cara lain yang tak berhasil diidentifikasi sebanyak 3,10%. Tentang cara-cara yang dilakukan oleh para buruh/karyawan saat berunjuk rasa tersaji di Tabel. XII.



**Tabel. XII**  
**Cara-Cara yang Ditempuh pada Unjuk Rasa Buruh/Karyawan di Surabaya**  
**(1995 s/d. September 1999)**

No.	Cara	Tahun					Jumlah
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Orasi, menggelar sepanduk dengan mendatangi:						
	a. Kantor wakil rakyat	2	0	5	7	5	19
	b. Kantor departemen pemerintahan	7	1	1	4	4	17
	c. Kantor kepolisian	0	1	0	0	3	4
	d. Rumah bos	0	0	0	0	2	2
	e. Kantor pemda	1	0	0	1	0	2
	f. Kantor pengadilan negeri	0	0	1	0	1	2
	g. Kantor LEH	0	0	0	0	1	1
	h. Kantor gubernur	0	0	0	0	1	1
	i. Kantor swasta	0	0	0	0	1	1
	j. Rumah gubernur/Graha	0	0	0	0	1	1
2	Orasi dan menggelar sepanduk di tempat kerja	6	2	1	1	25	35
3	Mogok kerja	6	5	5	4	13	34
4	Memblokade pabrik	0	2	0	0	1	3
5	Menyandera staf dan pimpinan	0	0	0	0	1	1
6	Longmarch	0	1	0	0	0	1
7	Aksi tutup mulut	0	0	1	0	0	1
8	Tak teridentifikasi	0	1	0	1	2	4
	<b>Jumlah</b>	22	13	15	18	61	129

*Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Surya dan Memorandum*

Sedangkan sopir ketika melakukan aksinya juga mirip dengan cara yang dilakukan oleh para buruh dan mahasiswa, yaitu banyak melakukan cara unjuk rasa sambil mendatangi tempat-tempat tertentu (57,7%), disamping dengan cara mogok tak menarik penumpang (34,62%) dan melakukan pengrusakan mobil serta kantor perusahaan (7,70%). Tabel. XIII berikut berisi cara-cara yang dilakukan para sopir di Surabaya saat berunjuk rasa.

**Tabel. XIII**  
**Cara-Cara yang Ditempuh pada Unjuk Rasa Sopir di Surabaya**  
**(1995 s/d. September 1999)**

No.	Cara	Tahun					Jumlah
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Orasi, menggelar sepanduk dengan mendatangi:						
	a. Kantor pernda	6	0	0	0	0	6
	b. Kantor departemen pemerintah	0	2	3	1	0	6
	c. Kantor wakil rakyat	0	1	0	1	1	3
2	Mogok tak menark penumpang	1	2	2	1	3	9
3	Merusak mobil dan kantor perusahaan	1	1	0	0	0	2
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>26</b>

*Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Jawa Pos, Surya, SI dan Memorandum*

Cara warga kampung (Tabel. XIV) ketika memperjuangkan tuntutannya juga didominasi oleh tindakan mendatangi tempat-tempat strategis (82,42%). Ada pula cara lain yang dilakukan, namun terkesan sangat keras dan arogan, hal ini dibuktikan diantaranya dengan tindakan melakukan pengaplingan/pematokan tanah yang disengketakan (6,59%), melakukan orasi dan menggelar sepanduk di tempat peristiwa (4,40%), merusak dan membakar rumah serta mobil milik makelar tanah yang diduga melakukan manipulasi tanah tetangga sekitarnya yang dilakukan sebanyak dua kali (2,20%) dan menghadang rombongan wakil rakyat yang sedang meninjau peresmian pasar, sedang cara yang tak teridentifikasi (3,30%).

**Tabel. XIV**  
**Cara-Cara yang Ditempuh pada Unjuk Rasa Warga Kampung di Surabaya**  
**(1995 s/d. September 1999)**

No.	Cara	Tahun					Jumlah
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Orasi, menggelar sepanduk dengan mendatangi:						
	a. Kantor wakil rakyat	6	2	0	12	8	28
	b. Kantor kelurahan	0	0	0	8	3	11
	c. Kantor pemda	1	0	0	4	3	8
	d. Kantor developer	0	3	0	0	2	5
	e. Kantor departemen pemerintah	0	3	1	0	1	5
	f. Kantor kepolisian	0	0	0	2	2	4
	g. Kantor gubernur	1	1	0	1	0	3
	h. Kampus	0	0	1	1	0	2
	i. Kantor pabrik	0	1	0	0	1	2
	j. Kantor kecamatan	0	0	0	1	0	1
	k. Kodam V Brawijaya	0	0	0	1	0	1
	l. Rumah gubernur/Grahadl	0	0	1	0	0	1
	m. Balai kota	0	0	0	0	1	1
	n. Rumah aparat/lurah	0	0	0	0	1	1
	o. Kantor BUMN	0	0	0	0	1	1
	p. Kantor pengadilan negeri	0	0	0	0	1	1
2	Melakukan pengaplingan/pematokkan	0	1	1	4	0	6
3	Orasi, menggelar sepanduk di lokasi kejadian	2	0	0	1	1	4
4	Merusak dan membakar rumah dan mobil	0	0	0	0	2	2
5	Menghadang rombongan wakil rakyat	0	1	0	0	0	1
6	Tak teridentifikasi	0	0	0	0	3	3
	<b>Jumlah</b>	10	12	4	35	30	91

*Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Jawa Pos, SI dan Memorandum*

Dari uraian tentang cara yang ditempuh dapat disimpulkan, bahwa dipandang dari frekuensi, cara yang banyak digunakan oleh seluruh pelaku aksi unjuk rasa (mahasiswa, buruh/karyawan, sopir dan warga kampung) adalah melakukan orasi dan menggelar sepanduk dengan mendatangi tempat-tempat tertentu. Sedangkan tempat yang

paling sering didatangi ialah kantor wakil rakyat/DPRD (oleh mahasiswa, buruh/karyawan dan warga kampung). Berbeda dengan ketiga pelaku aksi tersebut, sopir lebih memilih cara orasi dan menggelar sepanduk dengan mendatangi kantor pemda dan departemen pemerintah lainnya dari pada ke kantor wakil rakyat.

#### ***V.1.4. Jumlah Massa***

Banyak sekali organisasi mahasiswa yang dapat ditemukan, organisasi mahasiswa mempunyai sasaran perjuangan yang jelas, disamping semangat solidaritas mereka yang tak perlu lagi dipertanyakan. Dalam hal pengerahan massa saat melakukan aksinya, mereka pernah mengumpulkan jumlah massa hingga sekitar puluhan ribu mahasiswa (1,59%), disamping itu mereka pernah mengerahkan massa sekitar ribuan (15,29%), ratusan (40,44%), puluhan (27,39%), belasan (1,27%), kurang dari 10 mahasiswa (3,18%) dan tak teridentifikasi (10,83%).

**Tabel. XV**  
**Jumlah Massa yang Dikerahkan pada Unjuk Rasa Mahasiswa di Surabaya**  
**(1995 s/d. September 1999)**

No.	Tahun	Jumlah Pelaku Unjuk Rasa								Total
		Satuan	Belasan	Puluhan	Ratusan	Ribuan	Puluhan rb.	Jutaan	T.T.	
1	1995	0	0	7	9	0	0	0	3	19
2	1996	0	0	4	5	1	0	0	3	13
3	1997	0	1	9	5	0	0	0	1	16
4	1998	4	3	30	76	45	5	0	5	170
5	1999	6	0	36	30	2	0	0	22	96
	<b>Jumlah</b>	10	4	86	127	48	5	0	34	314

*Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Jawa Pos dan Surya*

Telah diketahui, terdapat tiga asosiasi yang menonjol di daerah perkotaan, yaitu asosiasi okupasi, teritorial dan profesi. Jumlah asosiasi okupasi di perkotaan nampaknya tak begitu banyak. Kecuali kehadiran serikat buruh, jarang ditemui adanya paguyuban seperti pedagang kaki lima, bahkan sopir. Sebenarnya, ditinjau dari ciri dasar asosiasi itu sendiri, adalah secara jelas memperjuangkan jenis kepentingan, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tindakan kolektif lebih mudah terbentuk. Jika tindakan kolektif lebih mudah terbentuk, maka yang terjadi, mereka lebih mungkin dapat berkumpul secara bersama-sama dalam jumlah besar ketika memperjuangkan kepentingan. Konsekuensinya, jumlah massa yang besar itu tak jarang dapat digunakan sebagai daya penekan, misalnya dengan jalan mogok kerja atau aksi tutup mulut.

Seperti pada unjuk rasa buruh/karyawan (Tabel. XVI), mereka banyak melakukan aksinya dengan mengerahkan massa dalam jumlah besar dibandingkan dengan sopir. Para buruh bahkan pernah sampai mengerahkan massanya hingga berjumlah ribuan (17,83%). Namun yang sering terjadi mereka banyak mengerahkan massa dalam jumlah sekitar ratusan orang (52,72%), diikuti oleh massa yang berjumlah sekitar puluhan (16,28%), belasan (1,55%) dan tak teridentifikasi (11,63%).

**Tabel. XVI**  
**Jumlah Massa yang Dikerahkan pada Unjuk Rasa oleh Buruh/Karyawan**  
**di Surabaya**  
**(1995 s/d. September 1999)**

No.	Tahun	Jumlah Pelaku Unjuk Rasa								Total
		Satuan	Belasan	Puluhan	Ratusan	Ribuan	Puluhan rb.	Jutaan	T.T.	
1	1995	0	0	6	10	3	0	0	3	22
2	1996	0	0	2	3	6	0	0	2	13
3	1997	0	0	2	11	2	0	0	0	15
4	1998	0	1	2	9	3	0	0	3	18
5	1999	0	1	9	35	9	0	0	7	61
	<b>Jumlah</b>	0	2	21	68	23	0	0	15	129

*Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Surya dan Memorandum*

Hal tersebut berbeda dengan sopir yang dalam melaksanakan aktifitasnya jarang bertemu atau berkumpul dengan jumlah massa yang besar. Diketahui, bahwa dari seluruh jumlah aksi unjuk rasa yang dilakukan sopir, sebagian besar dilakukan dengan mengerahkan massa yang berjumlah puluhan (50%), ratusan (38,46%) dan tak teridentifikasi (11,54%).

Jika aksi kolektif dapat dilakukan dengan mengerahkan jumlah massa yang besar, mereka tentu telah memiliki sasaran perjuangan yang jelas, tak ada kompetisi di sini melainkan bersatu guna memperjuangkan kepentingan. Logikanya, jika aksi kolektif jarang dilakukan dengan mempertemukan massa dalam jumlah yang besar, ada kecenderungan bahwa kesepakatan menjadi sukar terjalin. Diantara mereka jarang terdapat kekompakan, karena mereka berhadapan satu sama lain, misalnya dalam hal memperebutkan jalur \_\_yang pada hakekatnya memperebutkan penumpang\_\_.

**Tabel. XVII**  
**Jumlah Massa yang Dikerahkan pada Unjuk Rasa Sopir di Surabaya**  
**(1995 s/d. September 1999)**

No.	Tahun	Jumlah Pelaku Unjuk Rasa								Total
		Satuan	Belasan	Puluhan	Ratusan	Ribuan	Puluhan rb.	Jutaan	T.T.	
1	1995	0	0	5	2	0	0	0	1	8
2	1996	0	0	3	3	0	0	0	0	6
3	1997	0	0	3	1	0	0	0	1	5
4	1998	0	0	1	1	0	0	0	1	3
5	1999	0	0	1	3	0	0	0	0	4
	<b>Jumlah</b>	0	0	13	10	0	0	0	3	26

*Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Jawa Pos, Surya, SI dan Memorandum*

Beralih kepada unjuk rasa warga kampung, sebenarnya ketika mereka melakukan aksi kolektif, mereka sering melepaskan diri dari asosiasi yang melingkupinya. Asosiasi warga kampung itu sendiri tak lain adalah adanya RT/RW. RT/RW seperti yang terjadi di negara kita tidak bersifat sukarela, RT/RW telah berfungsi sebagai alat kontrol dan semi pemerintah, RT/RW digunakan sebagai alat memobilisasi warga untuk melaksanakan program-program pemerintah dan kurang dapat difungsikan sebagai media partisipasi politik. Akibatnya jarang RT/RW berfungsi sebagai wadah memperjuangkan kepentingan warganya.

Sehingga yang nampak, dalam kepentingannya mereka lepas dari asosiasi teritorialnya. Dengan membentuk kelompok diantara mereka sendiri, mereka berjuang menuntut hak-haknya. Paling banyak, para warga kampung bisa mengumpulkan sekitar

ratusan massa (57,14%), puluhan (19,78%), belasan (6,59%) dan massa yang berjumlah kurang dari 10 orang (6,59%) serta yang tak teridentifikasi (9,89%).

**Tabel. XVIII**  
**Jumlah Massa yang Dikerahkan pada Unjuk Rasa Warga Kampung di Surabaya (1995 s/d. September 1999)**

No.	Tahun	Jumlah Pelaku Unjuk Rasa								Total
		Satuan	Belasan	Puluhan	Ratusan	Ribuan	Puluhan rb.	Jutaan	T.T.	
1	1995	3	1	3	2	0	0	0	1	10
2	1996	2	2	3	4	0	0	0	1	12
3	1997	0	0	3	1	0	0	0	0	4
4	1998	1	2	5	27	0	0	0	0	35
5	1999	0	1	4	18	0	0	0	7	30
	<b>Jumlah</b>	6	6	18	52	0	0	0	9	91

*Sumber: Surat kabar Surabaya Post, Jawa Pos, SI dan Memorandum*

Dijelaskan kembali, mahasiswa dan buruh yang relatif memiliki organisasi/asosiasi yang mapan, cenderung bisa mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar. Mahasiswa pernah mengerahkan massa hingga puluhan ribu dan buruh pernah mengerahkan massa hingga berjumlah ribuan. Sopir yang belum memiliki asosiasi yang mapan dan warga kampung yang tak suka memanfaatkan asosiasi teritorialnya saat berunjuk rasa, cenderung tidak bisa mengumpulkan massa yang relatif besar, jumlah massa yang dikerahkan paling banyak berkisar ratusan orang.



### ***V.1.5. Kerugian Harta Benda dan Korban Fisik***

Tuntutan yang dikeluarkan mahasiswa tentu seiring sejalan dengan perkembangan keadaan negara, sepanjang tahun 1995 hingga September 1999 telah banyak korban yang berjatuhan, terutama ketika tuntutan reformasi gencar diperjuangkan. Sebelum isu reformasi mendapatkan perhatian serius atau pun sesudah suksesi terhadap pucuk pimpinan negara terjadi, hanya beberapa kasus saja yang bisa ditemui baik kerugian harta benda ataupun korban jiwa. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut, ketika mahasiswa dalam Partai Demokratik Indonesia bergabung dengan sekitar 300 buruh berjuang menuntut perbaikan nasib buruh (8 Juli 1996), para mahasiswa mengalami bentrokan dengan aparat yang berakibat pada penangkapan 14 mahasiswa. Saat berakhirnya konggres PDI di Medan, seperti yang terjadi di kantor DPD PDI Surabaya 28 Juli 1996 lalu, bentrokan mahasiswa yang tergabung dalam SMID dan PRD bentrok dengan para kader PDI, peristiwa ini dilatarbelakangi oleh masalah ketidakpuasan mahasiswa terhadap hasil konggres PDI di Medan, dalam peristiwa itu 11 mahasiswa akhirnya diamankan.

Tahun 1998, dimana semua elemen mahasiswa turun untuk menuntut dilakukannya reformasi total, banyak terjadi peristiwa yang memakan korban. Sakitnya 4 mahasiswa dalam Orang-orang Peduli Perubahan (OPP) akibat mogok makan di kampus Unair yang dilakukan sebagai sikap protes pada keadaan negara (4 dan 9 Maret 1999), bentrokkan dengan aparat dekat bundaran ITS Sukolilo yang memblokade

mahasiswa agar tidak keluar dari area kampus menyebabkan 7 mahasiswa mengalami luka-luka (11 Maret 1999) dan masing-masing satu mahasiswa luka-luka pada aksi yang terjadi tanggal 4, 8, 15 serta 22 April 1999 di kampus Unitomo saat berbagai mahasiswa se-Surabaya berusaha melakukan *longmarch*. Di kampus Unitomo pula, ditemui peristiwa seorang intel dari polwiltabes luka-luka digebug mahasiswa karena kepergok (9 April 1999). Aksi Seribu mahasiswa yang tergabung dalam Arek-arek pro Reformasi (APR) di kampus Unair diwarnai bentrokan fisik, semprotan air dan pelemparan batu dengan aparat, akibatnya 16 mahasiswa dan 2 polisi terluka (8 April 1999), masih di area kampus Unair, ratusan mahasiswa yang bentrok dengan aparat mengakibatkan 20 mahasiswa luka-luka dan dua luka parah di bagian kepala (19 Mei 1999). Disamping mengamankan aksi, aparat ternyata akan bertindak bila pernyataan mahasiswa memanaskan telinga, seperti yang terjadi di halaman kampus IKIP Surabaya, akibatnya 3 mahasiswa mengalami luka-luka.

Setelah tuntutan reformasi dikabulkan, frekuensi aksi mahasiswa perlahan-lahan menurun, begitu pula dengan korban yang ditimbulkan, ada sebuah kasus yang menimbulkan korban fisik, yakni ketika 6 mahasiswa dalam Aksi bersama Rakyat Indonesia (ABRI) yang bergabung dengan buruh P.T. Gudang Garam beberapa hari sebelumnya ditangkap petugas keamanan, mahasiswa melakukan aksinya sekali lagi dengan menuntut agar rekan mereka dibebaskan, namun yang terjadi berakibat pada bentrokan kembali sehingga 8 mahasiswa dan 2 aparat keamanan mengalami luka-luka.

Buruh sempat pula mewarnai aksinya dengan kekerasan, kegiatan pengrusakan seluruhnya dilakukan bersamaan dengan aksi mogok kerja yang dilakukan. Sebanyak 315 buruh P.T Cipta karya, 6-7 Februari 1999 lalu yang menuntut uang tunjangan dan transport mewarnai aksinya dengan melakukan pelemparan kaca kantor perusahaan serta dua mobil perusahaan. Begitu pula dengan buruh P.T. Sinarindo Megantara dan P.T. Palunesia tanggal 8-12 Februari 1999, mereka menuntut agar perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawan, sambil mengeluarkan tuntutan mereka juga melakukan pelemparan batu, akibatnya dua karyawan terluka dan 10 mobil hancur.

Dengan massa sebesar 5000 orang, buruh P.T Maspion I,II dan III (15 Februari 1999) melakukan mogok kerja menuntut kenaikan uang makan dan premi, diduga karena tidak puas terhadap dialog yang dilakukan antara komisi E-DPRD Jatim, direktur SDM dan ketua SPSI, mereka melakukan pengrusakan SPBU.

Kekerasan aksi unjuk rasa sopir yang pernah terjadi, semuanya dilakukan oleh sopir taksi, seperti pada tanggal 1-4 Juli 1995 lalu, 100 sopir taksi Zebra turun ke jalan dan melakukan pengrusakan taksi serta meninggalkan taksi di jalan-jalan berkaitan dengan masalah kenaikan batasan prosentase premi yang ditetapkan oleh perusahaan. Kejadian ini sempat berulang tanggal 13 Mei 1996, namun pelakunya adalah sopir taksi Merpati, 100 sopir protes terhadap tindakan perusahaan. Sopir yang tak puas melakukan penjungkirbalikkan beberapa mobil milik direktur perusahaan dan pengrusakan kantor.

Amuk massa yang dilakukan oleh warga kampung Menganti 20 Juni 1999, boleh jadi merupakan peristiwa langka. Persoalan dimulai ketika sungai seluas 3000 meter persegi yang berada dekat kampung diurug/ditimbun dengan tanah oleh seorang warga yang juga sebagai kontraktor dan makelar tanah, kemudian di jual ke investor. Karena warga tidak menerimakan, mereka menuntut ganti rugi, ketika tuntutan warga tidak diindahkan oleh makelar tersebut, amuk massa pun tak terhindarkan. Satu rumah dan lima mobil milik makelar di jalan raya Menganti, Karanganyar-Wiyung akhirnya hancur berkeping-keping diserbu sekitar 300 warga, aksi tersebut berulang hingga dua kali..

Dari peristiwa diatas, diperoleh gambaran, mungkin karena mahasiswa merupakan sosok pejuang muda, dari kalangan intelektual dengan idealisme tinggi dan emosi yang sulit dibendung, maka mereka lebih suka membangun front dengan aparat keamanan. Boleh jadi, karena mahasiswa dalam hal frekuensi lebih sering melakukan aksi dari pada buruh, sopir dan warga kampung, maka kemungkinan munculnya dampak kerugian/korban relatif lebih besar pula. Tetapi satu hal yang perlu mendapat perhatian penting, bahwa timbulnya kerugian, baik harta benda maupun korban fisik adalah dampak yang selalu menyertai dalam aksi memperjuangkan tuntutan.

Beralih pada keterlibatan mahasiswa dengan aksi unjuk rasa para buruh dan warga kampung, hal ini bisa pula dipahami. Mahasiswa yang pada dasarnya potensial untuk melakukan suatu gerakan, cenderung akan melakukannya sebagai respon terhadap ketidakobyektifan keadaan. Keterlibatan mahasiswa pada aksi unjuk rasa yang dilakukan

buruh (untuk memperjuangkan nasib buruh) dan warga kampung (untuk kasus tanah) menunjukkan posisi mahasiswa sangat efektif untuk melakukan rekrutmen massa, karena dilatarbelakangi oleh: keadaan struktural, desakan struktural dan berhasilnya pengembangan kepercayaan umum.

## V.2. Tujuan Jangka Panjang dari Perkembangan Pelaku Unjuk Rasa di Masa Datang

Secara umum diketahui, unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu wahana yang dipilih untuk mengekspresikan aspirasi kepada publik, demonstrasi sebagai budaya demokrasi dunia dewasa ini, terbukti tidak bisa dilarang dengan mekanisme yang bersifat konvensional, yakni hanya mengandalkan pada kekuatan militer yang represif, tetapi harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif, dimana semua pintu bagi masuknya semua aspirasi masyarakat terbuka lebar. Lebih ekstrim lagi, kita mungkin bisa melarang demonstrasi secara nasional dengan kekuatan militer dan kekuasaan yang kita miliki, tetapi kita tidak bisa melarang terhadap munculnya indikasi *global power play* \_\_munculnya demonstrasi-opposite yang bisa muncul dimana saja di muka bumi\_\_, seperti pada tragedi di Dresden beberapa tahun lalu yang sempat mendapat kecaman keras Presiden Soeharto (mantan). Globalisme kini telah membangun tata nilai dunia baru, bahkan merupakan ancaman terhadap eksistensi *national system*

secara menyeluruh. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana arah perkembangan unjuk rasa dimasa datang.

Unjuk rasa adalah perjuangan pembaharuan yang lebih bersifat substansial. Sebuah bentuk *reform-movement* lebih mengarah kepada *social changes*. Tema-tema sentral yang diperjuangkan menjadi mudah ditebak, yaitu yang bersifat umum/universal, seperti trilogi globalisme, yakni; tema tentang demokratisasi politik dan ekonomi, hak asasi dan lingkungan hidup. Demokratisasi sendiri bertujuan untuk mengikis kesempatan karena disfungsi kekuasaan politik.

Unjuk rasa di Indonesia sebenarnya merupakan bentuk antisipasi dinamis yang tampak pertama-tama dikalangan masyarakat *gross-cosmopolitan* yang sebagian besar telah menikmati hasil-hasil pembangunan. Mahasiswa sebagai contoh, adalah kelompok yang paling banyak melakukan aksi unjuk rasa, hal ini wajar melihat mahasiswa itu sendiri yang dapat dikategorikan sebagai kelompok menengah ke atas. Keterbukaan informasi dan kemampuan intelektual masyarakat *gross cosmopolitan* telah membentuk interaksi sosial yang secara dinamis telah menggerakkan reformasi kultural di lingkungan itu, kemudian mereka membentuk basis kultural baru yang merupakan akar berbagai perilaku politik kosmopolit yang progresif dewasa ini. Dapat dipahami, bahwa sulit untuk membendung kecenderungan reformasi kultural yang menyimpan energi ini dengan menggunakan mekanisme kekuasaan yang konservatif, tidak akurat, sakit dan kekurangan dana. Contoh kasus tentang fenomena ini adalah seperti yang

terjadi di pertengahan tahun 1997, dimana semua elemen masyarakat berjuang menuntut dilakukannya reformasi total. Perjuangan pelaku aksi memang akhirnya berhasil, tetapi seiring dengan itu jatuhnya korban jiwa dan kerugian materi dari berbagai pihak tak bisa dihindarkan, perjuangan memang butuh pengorbanan, namun seberapa besar pengorbanan yang mesti dibayar.

Sesungguhnya saluran komunikasi untuk menyatakan aspirasi telah terbentuk dalam tata hukum kita. Kebebasan berpendapat jelas dilindungi oleh undang-undang. Masalahnya adalah, kebebasan tersebut tidak berarti liberal tanpa batas, sehingga penyampaiannya tidak boleh inkonstitusional. Wadah-wadah penampung aspirasi rakyat telah ada secara formal. DPR dalam konstitusi kita merupakan wadah wakil rakyat yang selalu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Selain itu muncul pula wadah seperti lembaga bantuan hukum (LBH), SPSI dan lain-lain yang lebih berfungsi sebagai jembatan dalam proses penyaluran aspirasi itu sendiri. Untuk melihat tujuan jangka panjang unjuk rasa di masa datang lebih jauh, akan dilihat bagaimana peran lembaga seperti SPSI, LBH dan Organda terhadap munculnya unjuk rasa, cara penanganan, output kebijakan yang pernah dihasilkan dan antisipasi lembaga tersebut dalam menyikapi unjuk rasa akhir-akhir ini.

Ditinjau dari peran lembaga terhadap aksi unjuk rasa, LBH mempunyai komitmen terhadap penegakan hukum dan HAM, langkah konkritnya adalah dengan membentuk beberapa divisi: Divisi hak sipil dan politik yang berkaitan dengan hak-hak

asasi di bidang sipil dan politik, divisi perburuhan yang berkaitan dengan pembelaan terhadap hak-hak perburuhan, divisi pertanahan yang menangani segala kasus/sengketa tanah dan divisi lingkungan hidup. Di lain pihak, peran SPSI adalah proaktif, yang mana SPSI akan melakukan semacam kegiatan penyuluhan guna menjangkau seluruh permasalahan yang ada di perusahaan sebelum unjuk rasa itu sendiri terjadi. Menurut pihak SPSI:

“Secara kelembagaan, SPSI memakai mekanisme yang ada. Selain proaktif, SPSI juga mengatur sistem bagaimana iklim demokrasi dapat berkembang dalam unit perusahaan.”

Peran lembaga Organda dalam menghadapi unjuk rasa sopir lebih menekankan pada upaya preventif, yaitu dengan mengadakan kerjasama antar instansi terkait. Perlu diketahui, Organda memahami bahwa lembaga ini bukan satu-satunya tempat bagi munculnya solusi yang terbaik, Organda juga bukan sebagai wadah/kepentingan bagi pengusaha.

Tentang penanganan lembaga ketika unjuk rasa terjadi, LBH lebih banyak melakukan usaha pembelaan ketika unjuk rasa sudah mengarah pada tindakan anarkis aparat penegak keamanan. Posisi mahasiswa lebih banyak melakukan pembelaan praktis berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik mahasiswa itu sendiri, ketika mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa/demonstrasi dan secara tiba-tiba mendapat perlakuan keras, maka LBH juga akan melakukan pembelaan, begitu pula jika tindak



kekerasan ini menimpa buruh. Tentang sopir, tindakan LBH akan disesuaikan dengan kasus yang ada. Misalnya, jika kasus tersebut berhubungan dengan perburuhan, maka akan ditangani melalui bidang advokasi perburuhan. Jika ada indikasi pelanggaran hak-hak sipil politik yang dilakukan aparat dan sipil maupun militer, LBH juga akan melakukan pembelaan. SPSI sendiri lebih menitikberatkan pada upaya memberdayakan manusia di tingkat POK (unit kerja dalam perusahaan), POK adalah suatu basis kelembagaan, SPSI menekankan jalan musyawarah sebelum para buruh benar-benar akan memulai aksinya. Namun demikian, menurut pihak SPSI:

“Jika tuntutan tentang hak-hak normatif, maka penanganannya merujuk pada Undang-undang yang berlaku, tanpa mengenal kompromi. Tetapi jika tuntutan bukan mengenai hak-hak normatif, maka dapat dilakukan bargaining dengan perusahaan tempat buruh itu bekerja”.

Organda dalam menangani unjuk rasa lebih diarahkan pada jalan musyawarah dengan lembaga atau instansi terkait.

Mengenai kebijakan yang pernah dihasilkan oleh lembaga tersebut, diantaranya: Di LBH; kebijakan LBH sangat bervariasi sesuai bidang garap yang ada. Seperti kasus pertanahan, LBH akan melakukan reforma/modulasi peraturan-peraturan, membagi hak atas tanah, pendaftaran tanah dan lain-lain. Untuk perburuhan, unjuk rasa dijadikan materi terhadap visi kebijakan alternatif yang menjadi bahan reforma kebijakan yang lebih memberikan perlindungan secara konkrit terhadap perlindungan hak-hak buruh seperti penentuan politik pengupahan, kebebasan berserikat dan

sebagainya. SPSI dengan menyelenggarakan semacam pendidikan dan pelatihan dan Organda dengan melakukan penambahan armada.

Tantangan lembaga-lembaga tersebut sampai saat ini diantisipasi dengan mendidik para buruh tentang tata aturan mogok kerja serta batasan-batasan mengenai bentuk tuntutan yang realistis untuk SPSI, memberikan perlindungan hukum untuk LBH dan menggalang kerukunan/solidaritas dengan menggalakkan iuran rutin anggota untuk Organda.

Bertitik tolak dari uraian di atas, mengutip pendapat Gabriel A. Almond (1997) mengartikan bahwa aksi-aksi unjuk rasa yang berulang kali terjadi sebagai bentuk partisipasi politik. Karena merupakan partisipasi politik, unjuk rasa tidak tepat jika diberangus. Saat ini, aksi unjuk rasa bahkan lebih terbuka untuk dilakukan setelah Indonesia memasuki orde reformasi. Partisipasi politik dalam bentuk-bentuk aksi unjuk rasa justru memberikan kontribusi bagi kepentingan bangsa, seperti, gerakan mahasiswa menentang orde lama (1966), protes dibubarkannya SDSB (1993) dan tuntutan mengenai reformasi total (1998).

Jika dikaji lebih lanjut, aksi unjuk rasa mengarah kepada terbentuknya *clean government* (sebuah pemerintahan yang bersih). Aksi unjuk rasa digunakan sebagai peringatan kepada pemerintah (misalnya birokrasi) agar mengurangi sebanyak mungkin tingkah laku yang menyimpang. Jika kasus-kasus penyimpangan, misalnya penyunatan

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil temuan data dan analisa, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Isu yang sering diangkat oleh pelaku unjuk rasa adalah sesuai dengan karakteristik/ciri yang melingkupi dan berangkat dari kepentingan dasar para pelaku unjuk rasa itu sendiri. Mahasiswa yang merupakan kelompok dengan idealisme tinggi dan pejuang masyarakat lapisan bawah memilih tuntutan/isu reformasi secara total guna memperbaiki kondisi sosial, ekonomi serta politik negara. Buruh/karyawan merupakan kelompok yang banyak bergelut dengan pekerjaan memilih tuntutan kenaikan upah kerja, dan juga sopir yang memperlmasalahakan pemberian ijin trayek baru (mempertahankan jumlah penumpang yang otomatis berhubungan dengan perolehan pendapatan). Warga kampung yang merupakan kelompok yang membutuhkan ruang untuk menetap lebih banyak memperjuangkan soal tanah ketika hak mereka mulai terasa dihilangkan atau terabaikan.
2. Mahasiswa dan buruh lebih sering melakukan unjuk rasa di tempat dimana mereka banyak melakukan aktifitasnya di tempat tersebut, mahasiswa di kampus dan buruh/karyawan di pabrik. Sopir lebih mengutamakan dinas atau instansi pemerintah yang banyak berpengaruh/menentukan bagi lancar atau tidaknya jalur/lahan garap pekerjaan mereka. Sementara warga kampung lebih mempercayakan persoalannya untuk di bawa ke kantor wakil rakyat.

3. Mahasiswa, buruh/karyawan, sopir dan warga kampung ditinjau dari frekuensi lebih memilih cara melakukan orasi dan menggelar sepanduk dengan mendatangi tempat-tempat yang strategis untuk mengungkapkan tuntutan. Mahasiswa, buruh/karyawan dan warga kampung lebih suka mendatangi kantor DPRD, sementara sopir lebih memilih mendatangi kantor pemda dan departemen pemerintah dari pada ke kantor wakil rakyat.
4. Mahasiswa dan buruh/karyawan yang notabene telah memiliki organisasi/asosiasi yang telah mapan, lebih mampu mengerahkan massa untuk menekan tuntutan mereka dalam jumlah besar dibandingkan dengan sopir yang belum memiliki asosiasi mapan dan warga kampung yang tidak suka menggunakan asosiasi teritorialnya saat melakukan aksi unjuk rasa.
5. Karena mahasiswa dalam hal frekuensi lebih sering melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi, maka secara otomatis kemungkinan sekaligus dampak kerugian terbesar ada pada kelompok mahasiswa, dari pada yang terjadi pada pelaku unjuk rasa yang lain, yaitu; buruh/karyawan, sopir dan warga kampung. Seluruh pelaku unjuk rasa berpotensi, bahkan telah/pernah melakukan tindakan anarkis.
6. Arah perkembangan unjuk rasa mahasiswa, buruh/karyawan, sopir dan warga kampung pada khususnya, lebih menampakkan pada upaya-upaya terwujudnya *clean government* melalui tindakan kontrol mereka pada lingkungan sekitar. Unjuk rasa sebagai salah satu bentuk partisipasi politik memang mengarah pada terwujudnya perubahan sosial, ekonomi serta politik yang lebih demokratis.

Saran yang bisa disampaikan berkaitan dengan aksi unjuk rasa adalah mengingat kepada aksi unjuk rasa itu sendiri yang mustahil untuk dihilangkan atau diberangus, hendaknya unjuk rasa di tata/dikelola dengan menelurkan kebijakan guna pengaturan unjuk rasa, dengan catatan, pengaturan aksi unjuk rasa lebih berorientasi pada bagaimana meminimalkan tindakan pelaku unjuk rasa yang mengarah pada anarkisme. Pengaturan hendaknya jangan disalahartikan dengan membatasi ruang gerak bagi penyampaian aspirasi, namun dari pengaturan tersebut diharapkan kesemrawutan yang bakal ditimbulkan dari pelaku aksi dapat diantisipasi. Konkritnya adalah, ketika unjuk rasa telah di data, serta di ketahui akan dilakukan oleh kelompok warga tertentu dan di daerah tertentu, maka warga yang lain akan mengantisipasi, misalnya dengan menghindari area unjuk rasa guna menjauhkan dari kemacetan lalu lintas yang mungkin ditimbulkan, blokade/penutupan jalan/area atau dampak yang lain. Memang unjuk rasa lebih merupakan bentuk dari aksi spontan, sehingga kapan pun bila dikehendaki, maka unjuk rasa bisa saja muncul, namun yang perlu digarisbawahi, disamping dilakukan pengaturan bagi aksi spontan tersebut, pemerintah juga harus membuka pintu lebar bagi penyampaian aspirasi mereka serta beritikad baik untuk berusaha mewujudkan kehidupan bernegara yang lebih demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Altbach, Philip G. 1988. *Politik dan Mahasiswa, Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini*. Yayasan API dan Gramedia. Jakarta.
- Evers, Hans-Dieter. 1982. *Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*. LP3ES. Jakarta.
- Faisal, Sanapiah. 1989. *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hagopian, N. Mark. 1978. *Regimes, Movement and Ideologies: A Comparative Introduction to Political Science*. Longman. New York.
- Hauser, Philip M. 1985. *Penduduk dan Masa Depan Perkotaan, Studi Kasus di Beberapa Daerah Perkotaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Herlianto. 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Alumni. Bandung.
- Hoffer, Eric. Terj. Masri Maris. 1992. *Gerakan Massa*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- McAuslan, Patrick. 1986. *Tanah Perkotaan dan Rakyat Jelata*. Gramedia. Jakarta.
- Muryadi. 1997. *Aksi Unjuk Rasa Para Sopir di Surabaya, Studi tentang Faktor-faktor yang Melatarbelakangi dan Faktor-faktor Penyebab Sopir untuk Melakukan Aksi Unjuk Rasa*. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. Surabaya.
- Nas, P.J.M. 1979. *Kota di Dunia Ketiga, Pengantar Sosiologi Kota*. Bhatara Karya Aksara. Jakarta.
- Smelser, Neil J. 1971. *Theory of Collective Behaviour*. The Free Press. New York.

Artikel

- Husni Thamrin. 1989. *Aksi Mahasiswa, Gerakan atau Sekedar Letupan? Kedaulatan Rakyat*.

Ramlan Surbakti. 1997. Saluran Aspirasi Politik Kelompok Orang Miskin di Perkotaan. *Widyapraja No. 28 - Tahun XVIII*. Hal. 48-50.

\_\_\_\_\_. 1995. Masalah Politik di Perkotaan. *Surabaya Post*.

Umar Kayam. 1989. Tanpa Kemampuan Melihat Akar Masalah, Gerakan Mahasiswa Kini Cuma Gerakan Frustrasi. *Kedaulatan Rakyat*.

ni penji  
wiyoto

al : P  
bisnis  
Pustal